



DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT MAQÂSHID SYARÎAH: STUDI ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) dalam Ilmu Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

KHOIRI

NIM. 31890515498

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Khoiri
Nomor Induk Mahasiswa : 31890515498
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syari'ah
Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama
Bengkalis

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA
Penguji I/Ketua

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III/Utama

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Penguji IV

Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag
Penguji V

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
Penguji VI/Promotor

Dr. H. Zulkayandri, MA
Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan: 3 Mei 2021

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi berjudul: "Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut *Maqâshid Syariah*: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis" yang ditulis oleh:

Nama : Khoiri
NIM : 31890515498
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Untuk diajukan dalam sidang ujian terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Pekanbaru, April 2021
Promotor,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP. 195402121981031007

Pekanbaru, April 2021
Co-Promotor,

Dr. H. Zulkayandri, M.Ag
NIP. 197101051995031002

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 1972062822005012004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Tentang Dispensasi Nikah Telaah *Maqâshid Syar'iah* " yang ditulis oleh Khoiri, NIM 31890515498 Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Tertutup disertasi pada tanggal 31 Maret 2021 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

TIM PENGUJI:

Ketua (Penguji I)
Prof. Dr. Afrizal, M, MA


Tanggal

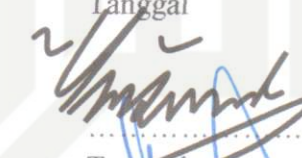
Sekretaris (Penguji II)
Dr. Jumni Nelly, M.Ag


Tanggal

Penguji III
Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag


Tanggal

Penguji IV (Penguji Utama)
Prof. Dr. K.H. Said Aqil Husin al-Munawwar, MA


Tanggal

Penguji V (Promotor)
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA


Tanggal

Penguji VI (Co-Promotor)
Dr. H. Zulkayandri, M.Ag


Tanggal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Khoiri

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasyim Riau

Di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama	: Khoiri
NIM	: 31890515498
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Kosentrasi	: Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul	: Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Tentang Dispensasi Nikah Telaah <i>Maqâshid</i> <i>Syar'iah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,
Promotor,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP. 195402121981031007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. H. Zulkayandri, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Khoiri

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasyim Riau

Di
- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama	: Khoiri
NIM	: 31890515498
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Kosentrasi	: Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul	: Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Tentang Dispensasi Nikah Telaah <i>Maqâshid</i> <i>Syariah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,
Co-Promotor,

Dr. H. Zulkayandri, M.Ag
NIP.197101051995031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiri
 NIM : 31890515498
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Katung, 17 Juli 1989
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
 Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut *Maqâshid Syar'iah*: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkalis, April 2021



KHOIRI
NIM. 31890515498



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Bersyukur dan pujian tanpa henti-hentinya Penulis panjatkan kepada Allah SWT zat yang mengatur semua kehidupan ini, karena penulis tidak menyangka dan mendunga, dari anak seorang petani yang berasal dari kampung yang terpencil mampu menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi yaitu Program Doktorat. Sujud syukur yang sedalam-dalamnya, karena rasa senang bercampurkan bahagia serta tetesan air mata keharuan dan kebahagiaan jatuh tidak terasa. Tetesan keharuan ketika masa-masa kuliah banyak tantangan dan hambatan yang penulis rasakan. Serta tetesan kebahagiaan ketika melihat kedua orang tua, kedua mertua, istri dan anak-anak tersenyum dan menangis bahagia ketika anak pertama, menantu, suami dan papa dari anak-anak bisa diwisuda dan memperoleh gelar Doktor (DR).

Shalawat dan salam Penulis haturkan dan persembahkan kepada kekasih Allah, putra Abdullah dan buah hati Siti Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. yang telah menjalankan peran kerasulannya untuk membahwa umat manusia kepada perubahan yang dahsyat, sehingga keabadian namanya tercium harum sepanjang masa dan tidak akan pernah hilang dikeang masa. Mudah-mudahan syafaat beliau akan selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada kita sebagai umatnya pada *Yaumul* *Mahsyar* nanti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Penyelesaian penulisan Disertasi ini tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak dan komponen. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh komponen pendukung dalam penulisan Disertasi ini mulai dari gagasan sampai tahap penyelesaian. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan yang penulis muliakan bapak Prof. Dr. Khairunnas, MAg. (Selaku Rektor), bapak Dr. Drs. H. Surya A. Jamrah, MA (Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd (Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan), bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph. D (Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau;
2. Yang terhormat keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia, bapak Menteri Agama, bapak Sekretaris Jenderal, bapak Direktorat Jenderal yang telah memberikan bantuan beasiswa *full study* Program 5000 doktor terkhusus angkatan tahun 2018, Kementerian Agama Republik Indoneisa;
3. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Afrizal, M, MA (Selaku Direktur), bapak H. Iskandar Arnel, MA, P.hD (Selaku Wakil Direktur), Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag (Selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga), bapak dan ibu majelis dosen (yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis serta seluruh Pegawai dan Karyawan keluarga besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA (Selaku Promotor) dan Dr. H. Zulkayandri, M.Ag (Selaku Co-Promotor) yang telah menyisakan waktu dan tenaganya untuk melihat, mengoreksi, mengarahkan serta membimbing penulis sehingga disertasi ini mampu diselesaikan tepat waktu;
5. Terkhusus dan termulia dan terbangga kedua orang tua (bapak Darmuji dan ibu Nafsiah, mertua (bapak Abdul Aziz dan Ibu Nurmiyati, istri tercinta (Maryani, Amd. Keb), anak tersayang (Arsy Nafeez Khaira) dan seluruh keluarga besar Penulis, terimakasih atas segala dukungan serta do'anya, semoga keluarga besar kita selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Swt;
6. Rekan-rekan seperjuangan Program Beasiswa 5000 doktor angkatan tahun 2018, Mukhlisin, S.HI., M.H (IAI Yasni Muara Bungo), Musthofa, MA, (STAI Solok Nan Indah), M. Rafi Riawi, M.Pd.I (STAI Hubul Wathon Duri), Firdaus, S.Sos., M.SI (IAI Tafaquh Dumai), M. Zein, M.A (MAN 2 Model), Novi Yanti, M.M (STAI Diniyyah) dan Putri Apria Ningsih, M.Esy (UIN Sultan Taha Jambi).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka suatu harapan yang diinginkan adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan. Sebagai penutup Penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah Swt semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin.

Bengkalis, April 2021
Penulis

KHOIRI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
HALAMAN SAMPUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO-PROMOTOR	
SURAT PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	16
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Kegunaan dan Manfaat.....	18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LANDASAN TEOERI

A. Kerangka Teori	20
1. Batas Usia Dewasa Dalam Sistem Hukum Nasional .	20
2. Batas Usia Pernikahan di Negara-Negara Muslim.....	24
3. Batas Usia Dewasa Dalam Sistem Hukum Islam.....	41
4. Batas Usia Dewasa Menurut Psikologi	44
5. Batas Usia Dewasa Menurut Medis	46
6. Batas Usia Dewasa Menurut Sosiolog	55
7. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam	62
8. Akibat Pernikahan Dini	71
9. <i>Maqashid Syariah</i>	87
B. Tinjauan Kepustakaan	107

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	114
2. Lokasi Penelitian	114
3. Sumber Data	114
4. Objek Penelitian	117
5. Populasi dan Sampel	118
6. Teknik Pengumpulan Data	119
7. Teknik Analisis	119
8. Metode Pembahasan.....	121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

B. Lokasi Penelitian	
1. Sejarah PA Bengkalis	122
2. Tugas dan Fungsi PA Bengkalis	134
3. Daftar Nama Pejabat dan Hakim PA Bengkalis	177

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Mengabulkan Perkara Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur	184
B. Pengaruh dan/atau Akibat yang Ditimbulkan Oleh Keputusan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Mengabulkan Perkara Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur	240
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Mengabulkan Perkara Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut <i>Maqasyid Syariah</i>	252

BAB V

PENUTUP	
A. Kesimpulan	318
B. Saran dan Rekomendasi	322

DAFTAR PUSTAKA	325
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	341
LAMPIRAN-LAMPIRAN	344



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFATAR TABEL

Tabel 1	Data Statistik Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2018.....	10
Tabel 2	Usia Perkawinan di Berbagai Negara Muslim	37
Tabel 3	Nama-Nama Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis	175

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SALWA CINTA

By: Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., MA.

بِمَ أَسْمِيكَ ؟

هل أَسْمِيكَ سلوى يا من سلووت بها الدنيا

Dengan nama apa engkau kan kupanggil,
Apakah ingin engkau kupanggil Salwa (pelipur laraku), sehingga dengan bersamamu
kan ku hibur diri ini melewati sisa hidup di dunia.

أُم أَسْمِيكَ نَجْوَى لَكِي أَنَا جِيكَ الْعَمْر كُلْهُ

Apakah ingin engkau kupanggil Najwa, agar supaya aku menyebut-nyebut namamu
dan membisikkannya dalam hatiku sepanjang hidupku.

أُم أَسْمِيكَ لَيْلَى، لَكِي أَعِيد ذَكَرَى مَجْنُون، جَنُونَهُ مِنْ جَنُونِي أَنَا

Apakah ingin engkau kupanggil Laila, agar kukembalikan kenangan si Majnun (Qais)
yang mencintai Laila. Walaupun cintanya hanya sebagian dari cintaku padamu.

لَا يَا حَبِيبَتِي، سَأَسْمِيكَ أَنَا، فَأَنْتَ أَنَا وَأَنَا أَنْتَ

Tidak wahai kekasihku. Saya akan menamaimu Ana (saya), karena engkau adalah
saya, dan saya adalah engkau. Kalau engkau berucap, kata hatiku yang engkau
ucapkan. Kalau aku berkeinginan, keinginanmu yang engkau wujudkan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN TRANSLITERASI

Halaman transliterasi mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 yaitu sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

ABSTRAK

Judul: Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut *Maqâshid Syari'ah*: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Riset Kesehatan Dasar (2013), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (2011), Penelitian BKKBN (2012), Penelitian KN-APK (2012), Penelitian Direktur Eksekutif PKBI (2012) menyebutkan bahwa pernikahan dini mengakibatkan hilangnya hak-hak anak, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kematian anak, KDRT dan lain-lain. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI mengatur batas usia perkawinan yaitu 19 bagi laki-laki dan perempuan, karena usia tersebut sudah dianggap mampu untuk membina rumah tangga dan melaksanakan hak serta kewajiban sehingga tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawadah dan rohmah* bisa tercapai. Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2018 menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 26 kasus dan semuanya dikabulkan oleh majelis hakim. Secara tidak langsung PA. Bengkalis melegalkan nikah dini dan tidak mendukung program Pemerintah serta regulasi undang-undang. Rumusan masalah (1) Apakah pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah?; (2) Apakah akibat hukum dengan di kabulkannya perkara dispensasi nikah? dan; (3) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim ditinjau menurut *maqasyid syariah*?. Penelitian ini penelitian lapangan, lokasi di PA. Bengkalis, data primer (putusan dan wawancara) data skunder kitab dan buku, popualsi dan sampel perkara dispensasi nikah tahun 2018, tehnik analisis data deskriptif, *conten analsis* serta analisis kritis. Hasil penelitian ditemukan: (1) Pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah: (a) calon pengantin perempuan sudah hamil duluan; (b) mereka sudah pacaran, kenal lama sehingga takut terjadi perzinahan dan; (c) berdasarkan konsep *kemaslahatan*. (2) Akibat yang ditimbulkan dari putusan hakim yaitu: (a) calon pengantin bisa nikah secara resmi; (b) dengan dikabulkan permohonan dispensasi nikah bisa menyebabkan perkara dispensasi nikah meningkat; (c) putusan pengadilan bisa jadi yurisprudensi dan (d) bahan penelitian; (3) Ditinjau menurut *maqashid syariah* dapat dilihat bahwa: (a) karena takut zina masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (b) Dengan menikah menyelamatkan nasab anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (3) Menikah bisa menjaga kehormatan keluarga masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan); (4) Menikah menyelamatkan keselamatan jiwa anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa); (5) Menikah bisa menyelamatkan pendidikan anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun aql* (menjaga akal). Namun ada *maqashid* lain yang mereka langgar seperti *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan) akibat perbuatan zina yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, *Maqashid Syariah*, PA. Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Title: The Marriage Dispensation Reviewed According to Maqashid Sharia: An analyst Study on The Ruling of The Bengkalis Religious Court Judge

Based on the research that conducted by basic health research (2013), the uwns and policy study (2011), BKKBN (2012) research, knakp research (2012), the study of the executive director of pkbi (2012), that early marriage results in loss of children's rights, such as education, playing time, protection, security, reproductive health, mother death, child death, domestic abuse, and so on. The 1974 statute for marriage and KHI established the marriage limit of 19 for men and women, since it was deemed sufficient to build a home so that the purpose of establishing a family is perfect, mawadah and rohmah can be achieved. The bengkalis religious court in 2018 received a marriage petition and was granted all by the panel of judges. On the indirect way, dad. Bengalis legalizes premature marriage and does not support government programs and regulatory laws. Problem formula (1) does the legal consideration of the panel of judges grant the cause of marriage dispensations?; (2) what is the consequence of law with which the cause of marital dispensations is committed? And; (3) how are the judgments of the panel of judges reviewed by islamic maqashib? It's field research, location in the pa. Bengkalis, primary data (judgments and interviews) of the books and books, popualsi and samples of the marital dispensation case population and samples of the 2018 marital dispensary, the descriptive data analysist, the content and critical analysis. Of the research found that: (1) the legal consideration of the panel of judges grants the petition for marriage dispensation: first, the bride is pregnant; Second, they date, know each other long enough to fear adultery; Third, based on the concept of masculinity. (2) the results of the judgment of a prospective bride can be legally married, with the request of a marriage dispensation granted can cause the cause of marriage dispensation to increase, the court ruling may refer, jurisprudence and research; (3) viewed by maqashisharia sharia it can be seen that: first, for fear of adultery, it enters maqasasyid sharia hifdzun nasl (preserving descendants). Second, by getting married to nasab child then entering maqasyid sharia hifdzun nasl (preserving offspring). Third, getting married keeps the honor of the family so it goes into maqashib sharia hifdzun al-ardh (preserving honor). Fourth, by marrying to save the child's life, you are in maqashib hifdzun nafs (mekeep the soul). Fifth, it can save a child's continued education in the maqashid sharia hifdzun aql (keeping sense). However, there were other maqashid that they violated, such as hifdzun nasl (guarding descent) and hifdzun al-ardh (maintaining honor) as a result of their adultery.

Keywords: Marriage Dispensation, Maqashid Sharia, PA. Bengkalis

ملخص

الإعفاء من الزواج من نظر مقاصد الشريعة؛ دراسة تحليلية عن قرارات قضاة المحكمة الدينية بنجكاليس.

استنادًا إلى الأبحاث التي أجرتها البحوث الصحية الأساسية (٢٠١٣)، مركز دراسات السكان والسياسة بجامعة ملانجا (٢٠١١)، البحوث ل.ب.ك.ب.ن (٢٠١٢)، البحوث ل.ك.ن.أ.ك.ف (٢٠١٢)، ذكر المدير التنفيذي ف.ك.ب.ن للبحوث (٢٠١٢) أن الزواج المبكر يؤدي إلى خسارة حقوق الأطفال، مثل التعليم واللعب والحماية والأمن والصحة الإنجابية ووفاة الأمهات ووفاة الأطفال والعنف المنزلي وغيرها. القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ ينظم الزواج وينظم ك.ه.ئ الحد الأدنى لسن الزواج وهو ١٩ سنة للرجل والمرأة، لأن هذا السن يعتبر قادرًا على الأسرة حتى يتحقق الهدف من تكوين الأسرة وهو السكنية والمودة والرحمة. قبلت المحكمة الدينية بنجكاليس في عام ٢٠١٨ طلبات الإعفاء من الزواج ووافق عليها جميعًا من قبل لجنة القضاة. بشكل غير مباشر تشرع المحكمة الدينية بنجكاليس الزواج المبكر ولا يدعم البرامج الحكومية واللوائح القانونية. أسئلة البحث: (١) ما نظر هيئة القضاة قضائياً بمنح قضية الإعفاء من الزواج؟ (٢) ما هي التبعة القانونية لمنح حق الإعفاء من الزواج؟ (٣) وكيف تتم مراجعة حكم هيئة القضاة وفق الشريعة المقاصدية؟ هذا البحث هو بحث ميداني، موقع في المحكمة الدينية بنجكاليس، بيانات أولية (قرارات ومقابلات)، بيانات ثانوية من كتب، مجتمع وعينة من حالات الإعفاء من الزواج في ٢٠١٨، تقنية تحليل البيانات الوصفية، التحليل المحتوى والتحليل النقدي. وكانت نتائج الدراسة كما يلي: (١) اعتبارات القضاة القانونية وافقت على طلب الإعفاء من الزواج: أولاً، العروس المرتقبة كانت حاملًا قبل عقد الزواج؛ ثانياً، كانا يتحابان، وقد تعارفا منذ فترة طويلة ويخافان أن يقعوا من الزنا؛ ثالثاً، وفقاً على أساس مفهوم المنفعة؛ (٢) نتيجة لقرار القاضي، أي أن العروس والعريس المرتقبين يمكن أن يتزوجا قانوناً، فمن خلال منحهما طلباً للإعفاء من الزواج، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة حالات الإعفاء من الزواج، ويمكن أن تصبح قرارات المحكمة مراجع، واجتهادات قضائية ومواد قانونية؛ (٣) بالنظر إلى مقاصد الشريعة، يمكن ملاحظة ما يلي: أولاً، بسبب الخوف من الزنا، يدخل في أحد مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل؛ ثانياً، بالزواج ينقذ نسل الولد، وهذا يدخل في أحد مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل؛ ثالثاً، من خلال الزواج المحافظة على شرف الأسرة، وهذا من أحد مقاصد الشريعة وهو حفظ العرض؛ رابعاً، بالزواج ينقذ حياة الطفل، يدخل في مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس؛ خامساً، بالزواج يمكن أن ينقذ استمرار تعليم الأبناء؛ وبه يتحقق أحد مقاصد الشريعة حفظ العقل.

الكلمات المفتاحية: الإعفاء من الزواج، مقاصد الشريعة، المحكمة الدينية بنجكاليس



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *lughawy* (bahasa), مقاصد الشريعة terdiri dari dua kata, yakni مقاصد dan شريعة. مقاصد adalah bentuk plural dari مقصد yang merupakan bentuk kata dari يقصد dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.¹

Sementara syariah menurut tokoh Mahmud Syaltut (w. 1382 H) yang merupakan seorang intelektual Mesir dan juga Syekh al-Azhar menyebutkan dan menjelaskan bahwa syariat adalah:

وَالشَّرِيعَةُ هِيَ النُّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعَ أَصُولَهَا لِيَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي عِلَاقَتِهِ
بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَعِلَاقَتِهِ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْحَيَاةِ

Artinya: "Syariat adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah SWT atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya di dalam perhubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama saudara yang Muslim, dengan sesama manusia, serta hubungannya dengan alam semesta dan hubungannya dengan yang hidup".²

UIN SUSKA RIAU

¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dan Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), Hlm. 178-179

² Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1996), Hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi yang dimaksud dengan *maqashid syariah* sebagaimana menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H) adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah SWT mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan) yakni untuk kemaslahatan bagi umat manusia.³

Tujuan-tujuan syariat tersebut sering kali diabaikan atau dilanggar dan tidak menjadi perhatian oleh sebagian muslim, sehingga syariat tersebut dirasa mengalami pergeseran secara konsep maupun praktik. Hal ini diduga kuat disebabkan oleh kurang pahaman akan tujuan syariat itu sendiri. Salah satu syariat Islam yang memiliki tujuan tertentu yang dirasa sering mengalami pergeseran dan sering dilanggar dalam tatanan kosep maupun praktik adalah masalah pernikahan.

Terdapat ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an yang berjumlah sebanyak 23, namun dari 23 surat tersebut tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang batasan usia nikah secara jelas dan terperinci. Termasuklah hadits-hadits Rasulullah SAW tentang nikah, juga tidak ada menyebutkan dan menjelaskan tentang usia dalam pernikahan. Dalam al-Qur'an maupun hadits hanya menyebutkan berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah seperti kata *rusydan*, *al-syabab* dan *istitha'ah*.

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 5 dan 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik (w. 179 H), Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm (w. 456 H) berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan izin darinya.⁴

Hal ini berdampak terhadap berbedanya usia pernikahan diberbagai negara muslim, termasuklah negara Indonesia. Ketentuan batas usia perkawinan di negara Indonesia terkhusus bagi umat Islam diantaranya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pada pasal 7 point (1) sampai dengan point (3). Pasal 7 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun". Pasal 7 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh

⁴ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t), Hlm. 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Kemudian pada pasal 7 ayat (3) diuraikan: "Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁵

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) sebagai berikut: (1) "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur sembilan belas (19) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur enam belas (16) tahun".⁶

Menariknya lagi tepatnya ada tanggal 14 Oktober 2019, hasil revisi undang-undang Perkawinan yang pernah diajukan terdahulu sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan dikeluar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan hasil amandemen Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terdapat perubahan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1)

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010), Hlm. 70.

⁶ Lihat, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996), Hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

disebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁷

Perubahan usia pernikahan bagi wanita ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam putusan tersebut yaitu: (1) Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan

⁷ Lihat, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas diskriminasi. (2) Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita akan dapat lebih cepat untuk membentuk sebuah keluarga atau pernikahan.⁸

Batas usia yang dimaksud tersebut dinilai telah matang jiwa raga (baik lahir dan batin) untuk dapat melaksanakan perkawinan dan membangun rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

UIN SUSKA RIAU

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁹

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan izin kedua orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu izin dari pihak orang tua atau wali, sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.¹⁰

Pasal 6 ayat (3) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Pasal 6 ayat (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan dispensasi nikah yang termaktub pada pasal 7 point dua (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pasa 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Roihan A. Rasyid menyebutkan bahwa dispensasi nikah adalah (keringanan) yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.¹²

¹¹ Ibid.,

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dan diuraikan dalam dua kata dasar yaitu dispensasi dan nikah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹³

Sementara itu menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan kata dispensasi yaitu merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan sebuah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperolehkan untuk dilaksanakan atau dilakukan tetapi hal tersebut bisa dilakukan karena ada sesuatu hal yaitu dispensasi.¹⁴

Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau dengan jumlah kasus pernikahan anak dibawah umur yang cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Bengkalis pada setiap tahunnya. Rata-rata Pengadilan Agama Bengkalis setiap tahunnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah diatas 25 perkara. Dari data tersebut bisa menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi

¹³ Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hlm. 270

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), Cet. V., Hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dan perlu dilihat lagi apa yang melatar belakangi dan menyebabkan para pemohon atau termohon melakukan tindakan ini.¹⁵

Melihat dari fenomena yang telah dipaparkan diatas maka sungguh sangat menarik sekali untuk diteliti disini yang berhubungan dengan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Bengkalis, Propinsi Riau. Berdasarkan data statistik Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2018 tercatat sebanyak 28 orang yang mengajukan permohonan perkara dispensasi nikah dan sebanyak 26 perkara sudah diputus oleh Majelis Hakim. Hal ini dapat dilihat pada statistik tabel berikut ini:

Tabel 1:
Data Statistik Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Di Pengadilan Agam Bengkalis Tahun 2018

No	Bulan	Masuk	Putus
1	Januari	2	-
2	Februari	4	2
3	Maret	3	4
4	April	5	7
5	Mei	4	3
6	Juni	2	4
7	Juli	4	3
8	Agustus	2	3
9	September	-	-
10	Oktober	2	6
11	Nopember	-	-
12	Desember	-	-
	Jumlah	28	26

Sumber: Data Statistik Pengadilan Agama Bengkalis

¹⁵ Data analisis awal penulis yang merujuk dari jumlah putusan perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2018 berjumlah 28 dengan rincian bulan januari sebanyak 2 perkara, februari 4 perkara, maret 3 perkara, April 5 perkara, Mei 4 perkara, Juni 2 perkara, Juli 4 perkara, Agustus 2 perkara, September nihil perkara, Oktober 2 perkara, Nopember nihil perkara dan Desember nihil perkara. Sementara itu perkara dispensasi nikah yang sudah putus sebanyak 26 perkara dengan rincian bulan januari sebanyak nihil perkara, februari 2 perkara, maret 4 perkara, April 7 perkara, Mei 3 perkara, Juni 4 perkara, Juli 3 perkara, Agustus 3 perkara, September nihil perkara, Oktober 6 perkara, Nopember nihil perkara dan Desember nihil perkara, jadi disana adalah 2 perkara. Jadi dari 28 permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2018, 26 permohonan sudah diputuskan oleh majelis hakim pada tahun 2018 dan sisanya 2 perkara belum diputuskan karena permohonan tersebut dicabut oleh para pemohon.

Dari beberapa perkara disepnsasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2018 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis melihat semua permohonan perkara dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Sehingga secara tidak langsung penulis melihat adanya ketimpangan dari apa yang telah ditentukan dan diharapkan oleh Undang-undang dalam hal ini terkhusus Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang batas minimal usia seseorang boleh untuk melangsungkan pernikahan dengan realita yang ada saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga tujuan pernikahan menurut KHI Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut, Perkawinan hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat (*misaqan galiza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian disebutkan dalam pasal tiga (3), Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan dapat terealisasi.

Di sisi lain *ius constitum* tidak menghendaki adanya nikah dibawah umur dan pemerintah juga selalu berupaya serta menggalakkan agar kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi sehingga dibuatlah semacam regulasi atau aturan pencegahannya berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terjadi lagi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dibuatlah semacam regulasi atau aturan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diterapkannya program wajib belajar sembilan tahun dan dua belas tahun sehingga dibuat semacam regulasi atau aturan berupa pendidikan atau sekolah gratis dan kemudian supaya tidak terjadi kematian ibu dan anak ketika proses melahirkan sehingga dibuat semacam regulasi atau aturan berupa Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan penerapan batas minimum usia pernikahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1991 tentang menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun undang-undang lainnya. Maka dalam hal ini secara tidak langsung Pengadilan Agama tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung program Pemerintah serta amanat dari Undang-Undang yang telah dibentuk oleh para legislatif dan yudikatif demi untuk kemaslahat masyarakat banyak.

Kemudian berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan diantaranya adalah Riset Kesehatan Dasar (2013), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (2011), Penelitian BKKBN (2012), Penelitian KNAKP (2012), Penelitian Direktur Eksekutif PKBI (2012) intinya menyebutkan bahwa pernikahan dini atau nikah muda mengakibatkan hilangnya hak-hak anak, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kematian anak, KDRT dan lain-lain. Seharusnya juga dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut juga menjadi acuan dan pertimbangan para hakim Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara nikah anak dibawah umur.

Apalagi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dengan target mengurangi perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8,74% di tahun 2024. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) 2020 menyebutkan bahwa bulan februari 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) tujuannya adalah untuk mengurangi perkawinan anak dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

11,2% menjadi 6,9% pada tahun 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.¹⁶

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Ketika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa dua juta anak perempuan/perempuan muda berusia 20-24 tahun menikah sebelum 19 tahun⁷, di mana 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun.¹⁷

Tingkat perkawinan anak bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia, dengan rata-rata 8% di Sumatera hingga 16% di Kalimantan pada tahun 2018. Grafik di bawah ini menunjukkan penyebaran perkawinan anak di bawah usia 18 tahun di seluruh Indonesia. Indonesia berada pada peringkat ke delapan tertinggi dengan angka absolut perkawinan anak di dunia. Menurut *United National Children's Fund* (UNICEF), Indonesia memiliki jumlah absolut pengantin anak kedelapan tertinggi di dunia dengan jumlah 1.459.000. Secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.¹⁸

¹⁶ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Bappenas, 2020), Hlm. 45

¹⁷ UNICEF dan PUSKAPA UI, *Factsheet: Child Marriage in Indonesia*, (Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI, 2020), Hlm. 7

¹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara di tahun 2011. Jumlah ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri, di mana Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara non-Islam. Penelitian AIPJ2 tahun 2019 tentang Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia memperkirakan bahwa kurang dari 5% dari perkawinan anak perempuan di Indonesia yang sebelumnya dibawa ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan dispensasi kawin.¹⁹

Pada tahun 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%).²⁰

Dari beberapa gejala-gejala serta fenomena-fenomena dan permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan serta dipaparkan pada latar belakang diatas, maka oleh karena itu penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti, mengkaji, membahas serta menganalisis lebih lanjut dan dalam serta

¹⁹ Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, (Jakarta: AIPJ2, 2019), Hlm. 8

²⁰ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lebih meluas lagi ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa disertasi yang berjudul : *"Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah (Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)"*.

B Batasan Masalah

Agar supaya penelitian ini lebih berkualitas, terarah serta mengingat keterbatasan dari segi waktu, tenaga dan besaran biaya penelitian serta banyaknya perkara-perkara perdata agama yang ada di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bengkalis, maka penulis perlu mengkrutkan dan membatasi penelitian ini kepada kasus-kasus (perkara) permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis yang telah diputus oleh majelis hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap (*incrah*) khusus sepanjang tahun 2018 dengan jumlah perkara sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara.

C Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon ?.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang baik adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mempunyai sebuah tujuan atau maksud yang ingin dicapai (peroleh) secara jelas dari hasil sebuah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon?.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah umur yang diajukan oleh para Pemohon ditinjau menurut *maqâshid syarî'ah*.

E. Kegunaan dan Manfaat

Sedangkan kegunaan dan manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak:

1. Selain ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama duduk di dalam bangku perkuliahan, juga sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas penelitian ilmiah akhir kuliah yaitu berupa disertasi yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.
2. Sebagai wahana untuk mengasah, mengembangkan dan meningkatkan sebuah wacana dan pemikiran bagi peneliti. Terkhusus secara mendalam mengenai perkara permohonan dispensasi nikah ditinjau menurut konsep *maqâshid syarî'ah* yang digali dari sebuah studi analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis.
3. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum keluarga terkhusus permasalahan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis. Setelah itu untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

permasalahan-permasalahan yang berhubungan serta berkaitan dengan dispensasi nikah yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

4. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi serta reverensi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya dimasa akan datang. Disisi lain sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A Kerangka Teori

Adapun beberapa kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batas Usia Dewasa Dalam Sistem Hukum Nasional

Untuk batas seseorang dikatakan sudah cukup umur atau dewasa sehingga mereka dianggap mampu atau cakap hukum serta bisa bertindak atas nama hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan hukum tersebut. Dalam sistem hukum nasional Indonesia seseorang dikatakan sudah dewasa itu berbeda-beda, ada aturan yang mengatakan batas usia seseorang dikatakan sudah dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, usia 19 (sembilan belas) tahun, usia 18 (delapan belas) tahun, usia 17 (tujuh belas) tahun dan ada juga yang usia 16 (enam belas) tahun.

Perbedaan ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-Undang Notaris, Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Sistem Tindak Pidana Anak yaitu¹.

Mengapa bisa terjadi perbedaan kategori dewasa dalam sistem hukum nasional kita?. Diantara penyebabnya adalah sumber rujukan dan referensi yang diambil dalam pembentukan sebuah peraturan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kriteria mereka yang sudah dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 tahun, sebagaimana kita ketua kedua aturan ini bersumber dari kitab-kitab fikih yang diambil dari pendapat-pendapat para ulama. Begitu juga KUHPerdata yang merupakan warisan Belanda, usia dewasa yaitu mereka yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Hal ini sama dengan usia dewasa yang berlaku di negara tersebut. Namun di kebanyakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7: kriteria dewasa laki-laki (16) tahun, perempuan (19) tahun. Direvisi dengan UU/16/2019 pasal 7: laki-laki dan perempuan (19) tahun. KHI pasal 15 (1): laki-laki (19) tahun, perempuan (16) tahun, pasal 6 (2) laki-laki dan perempuan (21) tahun. KUHPerdata, laki-laki dan perempuan (21) tahun/sudah menikah. KUHP pasal 45 laki-laki dan perempuan (16) tahun. UU/23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 7: laki-laki dan perempuan (17) tahun/pernah kawin. UU/10/2008 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 19 (1) laki-laki dan perempuan (17) tahun/pernah kawin. UU/32/2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 68: laki-laki dan perempuan (17) tahun/pernah kawin. UU/30/2004 tentang Jabatan Notaris pasal 39 (1): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/12/1995 tentang Pemasayarakatan pasal 1 (8): laki-laki dan perempuan (18) tahun/pernah kawin. UU/39/1999 tentang HAM pasal 1 (5): laki-laki dan perempuan (18) tahun/pernah kawin. UU/23/2002 tentang Perlindungan anak pasal 1(1): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1(26): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/12/2006 tentang Kewarganegaraan asal 4 (h): laki-laki dan perempuan (18) tahun/pernah kawin. UU/21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (5): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/44/2008 tentang Pornografi pasal 1(4): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/11/2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3): laki-laki dan perempuan (18) tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi aturan undang-undang nasional kita yang merupakan produk dari legeslatif dan eksekutif kita, untuk kriteria dewasa semuanya hampir sama yaitu kisaran usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.²

Selain itu perbedaan usia dewasa bisa juga dipengaruhi oleh mazhab hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau acuan dalam menentukan usia dewasa. Misalnya dalam mazhab hukum alam yang diprakarsai oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Hugo Grotius berbeda usia dewasa dengan mazhab hukum formalistis (*positivisme*) John Austin, berbeda lagi usia dewasa dengan mazhab hukum Friedrich Carl Von Savigny yang dikenal dengan mazhab historis. Kemudian ada lagi mazhab hukum yang lain seperti *utilitarianism* yang di gagasa oleh Jeremy Bentham dan Rudolph von Jhering, mazhab *sociological jurisprudence* gagasan Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dan mazhab realisme hukum gagasan hakim agung Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, dan Karl Llewellyn.³

² Analisis penulis terhadap perbedaan usia yang diatur dalam sistem Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam sistem hukum Indonesia jika terjadi gesekan di antara norma hukum maka asas hukum yang digunakan untuk memecah sebuah kebuntuan. Dalam konteks konflik antar-peraturan perundang-undangan, asas-asas yang relevan untuk digunakan adalah *lex superior derogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebih umum), *lex posterior derogat legi priori* (aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lama). Misalkan berkaitan dengan batas usia dewasa, ketentuan dalam KUHPerdara dipandang sebagai ketentuan umum, sehingga untuk bidang keperdataan yang khusus digunakan undang-undang yang lebih spesifik. Asas *lex specialis derogat legi generalis* diberlakukan dalam konteks itu, syaratnya peraturan yang bersinggungan haruslah sederajat. Misalnya, Undang-Undang Jabatan Notaris menyimpangi ketentuan batas usia dewasa dalam KUHPerdara. Demikian halnya dalam ketentuan lain di bidang yang lebih spesifik. Kedua asas lainnya tentu dapat digunakan dalam kondisi yang sesuai. Meskipun keberadaan asas hukum dapat memecahkan kebuntuan, tetap dibutuhkan harmonisasi. Penggunaan asas hukum amat bergantung pada penegak hukum maupun pemangku kebijakan. Hal lain adalah mempertimbangkan batas usia yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, meninjau ulang batas minimal untuk menikah dan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal lain adalah mempertimbangkan batas usia yang sudah ada apakah sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya selain untuk memberi kepastian hukum batas usia dewasa juga memastikan perlindungan terhadap anak. Pembedaan perlakuan berbeda bagi anak dan dewasa di hadapan hukum telah menjadi perhatian khalayak sejak lama.⁴

2. Batas Usia Pernikahan Di Negara-Negara Muslim

a. Negara Turki dan Cyprus

Batas usia perkawinan di Turki tertulis dalam *The Turkis Civil Code* 1954, sebuah pembaruan hukum dari ketentuan sebelumnya, yakni *Otoman Law of Family Right* 1917, pasal 4, dan dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan. Bagi laki-laki, batas usia perkawinan minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, dan bagi perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan izin perkawinan kepada laki-laki berusia 15 (lima belas) tahun dan perempuan berusia 14 (empat belas) tahun.⁵

Pemberian izin perkawinan ini setelah mendengar penjelasan dari orang tua kedua mempelai. Saat ini, usia yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah umur 17 (tujuh belas) tahun bagi laki-laki, dan umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Bahkan dalam

⁴ *Ibid.*,

⁵ Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), Hlm. 103-104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kasus, pengadilan telah mendengar penjelasan dari orang tua (pengasuh/wali), memberikan izin perkawinan pada laki-laki yang berusia 15 (lima belas) tahun dan berusia 14 (empat belas) tahun bagi perempuan.⁶

b. Negara Libanon dan Israil

Ketentuan hukum Islam yang berlaku di kedua negara tersebut merujuk kepada *Ottoman Law of Family Right* 1917. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia perkawinan yang tidak normal. Ibnu Subruma yang dikutip oleh Thahir Mahmood menjelaskan bahwa usia perkawinan di kedua negara tersebut adalah umur 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan umur 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Akan tetapi dalam beberapa kasus pengecualian, Pengadilan memberikan ijin kepada orang yang telah dewasa (masa remaja) yang berusia 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki dan berusia 9 (sembilan) tahun bagi perempuan.⁷

Perbedaan batasan usia perkawinan di kedua negara tersebut disanding dengan negara lain didasarkan kepada landasan historis dan normatif yang ada dalam Islam. Batasan usia perkawinan 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan di kedua negara tersebut didasarkan kepada mazhab Hanâfi sebagai mazhab yang

⁶ Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzha: Sebuah Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hlm. 41

⁷ *Ibid.*, Hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam *Ottoman Law of Family Right* 1917. Mazhab Hanafi berdasarkan batas usia perkawinan antara maksimal dan minimal.⁸

c. Negara Sudan

Di Sudan, tidak ada batasan usia perkawinan secara normal yang ditentukan oleh pengadilan. Di Sudan, kriteria perkawinan ditentukan oleh dewasa tindakan seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang memberikan izin kepada orang tuanya. Maksudnya, orang tuapun harus mendapatkan izin dari anaknya ketika mau menikahkan. Keunikan lain, perkawinan terjadi karena takut terjadi dekadensi moral terhadap wanita. Akan tetapi standard usia perkawinan diberlakukan adalah 10 (sepuluh) tahun. Adalah wajar dalam pandangan Thahir Mahmud, bahwa proses reformasi hukum di Sudan disebut unik. Keunikannya karena sudah menganut dua mazhab: Hanafi dan Syafi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum. Pasal yang berkenaan dengan batasan perkawinan dijelaskan dalam *Law on Marriage Guardianship of Sudan* 1960, pasal 7 dan 8.⁹

d. Negara Syiria

Batasan usia perkawinan di Syiria tidak menetapkan secara ketat, umur perkawinan bagi pria adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan wanita 17 (tujuh belas) tahun. Jika pengadilan menemukan ketidak

⁸ *Ibid.*, Hlm. 44

⁹ *Ibid.*, Hlm. 84 dan 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuaian dalam usia antara pihak-pihak yang dipertunangkan, hakim boleh menahan izin untuk pernikahan. Di samping itu, ditetapkan juga jika wanita dewasa menikah diri sendiri tanpa persetujuan wali, perkawinan tersebut masuk perkawinan sah kalau menikah dengan laki-laki yang *sekufu*'. Sebaliknya, kalau nikah dengan orang laki-laki yang tidak *sekufu*', wali hendak menuntut pembatalan, kecuali kalau si wanita telah hamil, hak pembatalan wali menjadi hitam.¹⁰

Apabila seseorang telah berusia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan berusia 14 (empat belas) tahun bagi perempuan berkehendak untuk menikah, Hakim dapat memberikan ijin setelah melihat bukti kematangan secara fisik maupun psikis dan dukungan pula oleh ijin dari orang tua mempelai. Begitu pula, hakim berperan sebagai mediator apabila terjadi perbedaan usia antara kedua belah pihak mempelai. Batasan usia, baik di Yordania maupun Syria adalah sama, yakni usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena kedua Negara tersebut merujuk kepada *Ottoman Law of Family Right* 1917 yang menetapkan batasan usia seperti yang didasarkan kepada mazhab Hanafi, namun pada akhirnya Yordania melakukan perubahan tentang batasan

¹⁰ Khaoirudin Nasution, *Op., Cit.*, Hlm. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, usia 16 (enam belas) bagi laki-laki dan usia 15 (lima belas) bagi perempuan.¹¹

e. Negara Iran

Batasan perkawinan yang berlaku di Iran adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lima belas) tahun bagi perempuan. Ketentuan ini berdasarkan pada *The Iranian Family Laws, Marriage Laws 1931-1938 (Qanun al-Izdniwaj)*. Aturan usia perkawinan ini berlaku ketat dan tidak berlaku pengecualian. Iran tidak memberlakukan usia di bawah *standard* perkawinan yang telah disepakati. Sebaliknya jika kedua mempelai yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, justeru akan mendapat hukuman penjara 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun. Bahkan apabila usia perempuannya di bawah umur 13 (tiga belas) tahun, akan dikenakan penjara selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun. Di samping harus membayar denda antara 2000 (dua ribu) sampai 20.000 (dua puluh ribu) *riyal* tergantung kasus yang dihadapi. Pemberlakuan hukuman ini setelah tahun 1935.¹² Hukum keluarga di Iran mengalami beberapa kali reformasi dan amandemen. Peraturan yang ada dalam hukum tersebut tidak hanya mengambil teori hukum aliran *syi'ah itsna*

¹¹ Dedi Supriadi, *Op., Cit.*, Hlm. 46

¹² *Ibid.*, Hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'asyariyyah, melainkan me masukkan beberapa teori hukum dari aliran di luarnya.¹³

f. Negara Malaysia

Malaysia adalah negara federal yang memiliki hukum berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah atau bagiannya serta merupakan negara di Asia Tenggara yang pertama kali melakukan pembaharuan hukum Islam. Semua negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri dalam bidang keluarga yang umum dikenal dengan sebutan enakmen atau statut (statuta dalam bahasa Inonesia). Adapun enakmen-enakmen yang dimaksudkan seperti diringkaskan Muchtar Zarkasyi sebagai berikut:

1. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Kedah 1979 (1964);
2. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Kelantan, 1983;
3. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Malaka, 1983;
4. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Negeri Sembilan, 1983;
5. Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan, 1984;
6. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Slangor, 1984;
7. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Perak, 1984;
8. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Pulau Pinang, 1985;
9. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Trengganu, 1985;
10. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Pahang, 1987;

¹³ Khoiruddin Nasution, *Op., Cit.*, Hlm. 234



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Perlis (draf);
12. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Pindaan, Klantan, 1985;
13. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Pindaan, Klantan, 1987;
14. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Pindaan, Slangor, 1988;
15. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Johor, 1990;
16. Ordinal Keluarga Islam, Serawak, 1991;
17. Enakmen Undang-undang keluarga Islam, Sabah.¹⁴

Untuk batas usia perwakinan di negara Malaysia merujuk kepada hukum keluarga Islam (wilayah federal) Undang-undang tahun 1984 nomor 304 terdapat pada pasal 8 dan 37. Pada pasal 8 dijelaskan bahwa: "Tidak boleh melangsungkan pernikahan atau melakukan pencatatan pernikahan dimana usia perkawinan masing-masing di bawah umur 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 (enam belas) bagi perempuan, kecuali hakim Syariah mengizinkannya secara tercatat dalam kondisi tertentu".

Kemudian pasal 37 berbunyi: "Kecuali diizinkan menurut hukum Syar'i setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman apapun (a) memaksa seseorang untuk menikah yang bertentangan dengan keinginannya atau (b) mencegah seseorang laki-laki yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau wanita yang sudah

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Duna Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. I, Hlm. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perjanjian perkawinan yang sah adalah merupakan suatu kejahatan dan dihukum dengan denda paling banyak 1000 (seribu) ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau dihukum denda dan hukuman kedua-duanya yaitu denda penjara.¹⁵

g. Negara Yordania

Yordania pernah memberlakukan *Qanûn al-Huquq al-'A'tilah al-Urduniah* Nomor 26 tahun 1947. Oleh karenanya, dengan lahirnya undang-undang nomor 92 tahun 1951 maka semua undang-undang terdahulu sudah terhapuskan. Undang-undang nomor 92 tahun 1951 ini mencakup 132 pasal yang dibagi dalam 16 bab. Konon Undang-Undang ini sangat mirip dengan undang-undang Turki tahun 1917, baik dari segi strukturnya maupun aturan rinciannya. Kemudian undang-undang ini diperbaharui dengan undang-undang yang lebih lengkap (*comprehensive*) dengan lahirnya *Law of Personal Status* atau lebih dikenal dengan istilah *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Nomor 16 tahun 1976 yang mencakup 187 pasal dan terbagi dalam 19 bab.¹⁶

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Yordania salah satunya terkait dengan masalah usia menikah. Mengenai usia pernikahan dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan adalah 17 (tujuh

¹⁵ Undang-Undang tahun 1984 nomor 304 terdapat pada pasal 8 dan 37.

¹⁶ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In the Muslim Marriage*, (New Delhi: t.p., 1972),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lima belas) tahun bagi perempuan.¹⁷ Hal ini merupakan ketentuan yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 92 tahun 1951. Sebelumnya, ketentuan usia nikah adalah 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Jika melanggar ketentuan tentang usia tersebut, maka pelanggaran akan dikenakan hukuman pidana.¹⁸ Akan tetapi, apabila perempuan telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara walinya tidak mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip *kafa'ah* dan pengadilan dapat memberikan izin pernikahan. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun walinya keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberikan izin pernikahan. Ketentuan ini merupakan langkah mau jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam kitab fikih mazhab. Sebab batasan yang dijelaskan dalam kitab fikih mazhab cukup dengan alasan batasan bahwa laki-laki atau perempuan yang akan menikah itu telah baligh.¹⁹

¹⁷ Khoiruddin Nasution, dkk., *Op., Cit.*, Hlm. 70

¹⁸ Abdullah Ahmad An-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, (London: Zed Books, 2002), Hlm. 120

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa. Maskur A.B. Dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), Cet. Ke-7, Hlm. 317-318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Negara Tunisia

Ketentuan batas usia perkawinan pertama kali sebelum diperbarui yaitu wanita 15 (lima belas) tahun dan pria 18 (delapan belas) tahun.²⁰ Setelah dilakukan perubahan laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia minimal 20 (dua puluh) tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 UU 1956 yang mana sebelum diubah, ketentuannya adalah 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat melangsungkan perkawinan, pasangan yang berusia di bawah 20 (dua puluh) tahun harus mendapat izin dari wali. Jika wali tidak memberikan izin, perkara tersebut dapat diputus oleh pengadilan.²¹

Bunyi pasal 5 dan 6 dalam *The Code of Personal Status* yang mengatur tentang batas usia pernikahan dapat dilihat di bawah ini, sebagai berikut: Pasal 5 berbunyi: "(a) Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan harus bebas dari halangan pernikahan; (b) Seseorang laki-laki yang belum berumur 20 (dua puluh) tahun dan seorang wanita yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tidak dapat melakukan kontrak pernikahan; (c) Pernikahan seseorang di bawah umur tersebut harus mendapatkan izin dari pengadilan. Izin tersebut

²⁰ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Op.Cit.*, Hlm. 158

²¹ Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, (London: CIMEL and Kluwer Law International, 1996), Hlm. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diberikan kecuali ada alasan yang kuat dan ada kepentingan yang jelas dari kedua belah pihak". Kemudian pasal 6 berbunyi: "Pernikahan seseorang yang tidak sampai umur dewasa harus mendapatkan izin dari wali. Jika wali menolak untuk memberikan izin terhadap pernikahan tersebut, maka persoalan tersebut diputuskan oleh pengadilan".²²

i. Negara Pakistan

Materi hukum keluarga terkait dengan batas usia pernikahan di Pakistan, dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut termaktub dalam *Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961* pasal 4, 5 dan 6 ayat 1. Maka jika terjadi pernikahan antara pria yang berusia diatas 18 tahun terhadap perempuan di bawah usia nikah, dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal 1000 (seribu) rupee ataupun keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan, memerintahkan atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur.²³

j. Negara Mesir

Mesir sebelum adanya pembaruan dalam Hukum Keluarga masih menggunakan fikih tradisional yang dibawa oleh mazhab Syafi'i dan

²² Rahmat Arijaya, *Hukum Perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia)* (Tesis: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), Hlm. 109-110

²³ Mufti, "Hukum Keluarga Islam di Pakistan", dalam <http://www.scribd.com/>, Artikel diakses pada tanggal 11 Nopember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Hanafi, sehingga dalam pernikahan tidak terdapat batasan usia dalam menikah.²⁴ Pembaharuan Hukum Keluarga secara tidak langsung sebenarnya terjadi sejak Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 M, karena adanya Napoleon mempengaruhi Hukum Keluarga di sana. Napoleon berusaha agar Hukum Prancis dilaksanakan juga di Mesir, dan berusaha memarginalkan hukum Islam di sana.²⁵ Dalam aturan Hukum Prancis usia minimal menikah bagi seorang laki-laki dapat menikah adalah usia 18 (delapan belas) tahun dan perempuan usia 16 (enam belas) tahun.²⁶ Pembatasan usia minimal menikah salah satunya seperti yang diatur dalam pasal 99 ayat (5) Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan: "Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia istri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari delapan belas tahun". Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga.

k. Negara Arab Saudi

Berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga di dunia Islam, menurut Tahir Mahmood bahwa negara-negara Islam yang berpenduduk muslim dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, salah satunya adalah negara Saudi Arabiya. Dalam pemikiran fikih klasik seperti yang

²⁴ Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993), Hlm. 99

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha ilmu 2011), Hlm. 35

²⁶ Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, *Loc., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan oleh semua sekte dan mazhab, usia minimum tidak dicantumkan sebagai syarat dalam perkawinan. Wali memiliki peran untuk menikahkan anak mereka tanpa persetujuannya. Dimana oleh pemikiran sunni dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali (*non-Hanafi*) serta syi'ah dari mazhab Itsna Asyari, dikenal sebagai *jabr* atau *ijbar*, yang hanya dimiliki oleh sejumlah wali. Dengan demikian, dalam mazhab Maliki, kekuasaan dimiliki oleh ayah atau pelaksananya yang diberi wasiat oleh ayahnya. Begitu juga dalam mazhab Hanbali, diperuntukkan hanya bagi ayah atau pelaksananya, namun yang terakhir (pelaksana) hanya terjadi atas persetujuan ayahnya dan bagi mazhab Syafi'i dan Ithna Ashari, diperuntukkan bagi ayah dan kakek dari pihak ayah.²⁷

Aturan hukum mazhab Hanafi, peran wali dalam semua perkawinan memiliki kekuatan *ijbar*, akan tetapi Syafi'i, Maliki dan Hanbali kuasa *ijbar* tersebut tidak hanya dimungkinkan dalam pelaksanaan pernikahan anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan), tetapi juga bagi perempuan yang sudah menikah, berapa pun usianya, namun Hanafi izin ini hanya berlaku bagi yang berusia di bawah umur (laki-laki maupun perempuan) dalam akad pernikahan tanpa persetujuan mereka. Dewasa pria dan wanita memiliki hak untuk

²⁷ Dawoud El Alami dan Dorren Hinchillfe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, (London: CIMEL, 1996), Hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan kontrak pernikahan mereka sendiri dan tidak pernah menikah tanpa persetujuan mereka.²⁸

Menurut pemikiran fikih klasik seperti yang diterapkan oleh semua sekte dan mazhab, kedewasaan dicapai di masa seorang *pubertas*. Namun, ada usia minimum di bawah ini yang kaitannya dengan anggapan yang tidak terbantahkan bahwa *pubertas* tidak tercapai pada usia dua belas tahun dalam kasus anak laki-laki dan sembilan dalam kasus perempuan. Setelah menyelesaikan tahun kelima ada praduga yang tidak terbantahkan menurut kebanyakan ahli hukum bahwa *pubertas* telah dicapai, tetapi antara usia minimum yang ditetapkan oleh fikih klasik dan lima belas, *pubertas* mungkin terbukti sebagai bukti yang nyata.

Undang-undang perkawinan di dunia Islam memang berbeda dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:²⁹

Tabel 2:
Usia Perkawinan di Berbagai Negara Muslim

No	Negara	Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Banglades	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 6-7

²⁹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (18 New Delhi: N.p., 972),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Irak	18	18
6	Yodania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Israel	20	19
19	Cyprus	18	17 ³⁰

Data Olahan Peneliti Berdasarkan Uraian Diatas

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah disimpulkan bahwa usia nikah yang dianut oleh dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara usia 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 (delapan belas) tahun. Umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria, rata-rata usia nikah adalah 16 (enam belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun, sementara usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia nikah bagi perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 (satu) hingga 6 (enam) tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah kaum laki-laki.

³⁰ Dedi Supriyadi, *Op., Cit.*, Hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang perkawinan di dunia Islam baik di Asia Tenggara maupun di negara timur tengah memang berbeda dalam menentukan batas minimal usia perkawinan, ada negara yang mengatur batas usia perkawinan minimal berusia 15 (lima belas) tahun, berusia 16 (enam belas) tahun, berusia 17 (tujuh belas) tahun, berusia 18 (delapan belas) tahun, berusia 19 (sembilan belas) tahun, berusia 20 (dua puluh) tahun dan berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menurut hemat penulis terjadi perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu mazhab fikih yang dipakai dan dijadikan rujukan dalam suatu daerah atau wilayah tersebut misalnya menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H) tanda dewasa atau baligh itu bermimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, jika diukur dengan usia kisaran umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam Malik (w. 179 H) juga ditandai dengan mimpi, menstruasi dan tumbuh beberapa rambut anggota tubuh. Sementara menurut Imam Syafii (w. 204 H) seseorang dikatakan dewasa mereka yang sudah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) yaitu mereka yang sudah berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dan ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi wanita. Artinya dalam menentukan usia dewasa atau baligh, ulama mazhab saja berbeda, hal ini juga berdampak kepada perbedaan usia dewasa di sebuah negara berdasarkan mazhab yang diikuti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian menurut penulis, terjadi perbedaan usia dewasa di berbagai negara juga ditentukan oleh perkembangan fisik seseorang (dan daerah tropis yang berbeda) hal ini mungkin karena dipengaruhi oleh faktor makanan, budaya, keturunan dan juga berkembang sebuah daerah atau negara. Misalnya daerah atau negara yang sudah dikategorikan negara maju kemudian anak-anaknya diberikan alat-alat elektronik seperti handphone, komputer, siaran televisi yang acaranya mungkin film dewasa, kebebasan untuk menggunakan media sosial serta mengakses situs-situs dewasa, biasanya anak-anak daerah tersebut lebih cepat dewasa dan *baligh* daripada anak-anak yang hidup tinggal di daerah tertinggal yang tidak pernah atau jarang menyentuh dunia digital dan komunikasi. Begitu juga biasanya anak-anak yang tinggal di kota lebih cepat dewasa dibandingkan anak-anak yang tinggal di kampung atau pedesaan.

Selain itu faktor keturunan juga sangat mempengaruhi kedewasaan seseorang, misalnya orang arab itu poster tubuhnya tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga kita melihat anak-anak orang arab yang usia 9 (sembilan) tahun itu sudah seperti anak-anak Indonesia yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun. Sehingga tanda-tanda dewasa yang dialami oleh anak-anak orang arab seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi perempuan dilihat dari segi umur kemungkinan lebih cepat dibandingkan anak-anak orang Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Batas Usia Dewasa Dalam Sistem Hukum Islam

Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh* ³¹bagi perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H), tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.³²

Menurut Imam Malik (w. 179 H), baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i (w. 240 H) batasan baligh adalah usia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan usia 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 (lima belas) tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.³³

³¹ Haidh adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan. Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, (Surabaya: alMiftah, 1992), Hlm. 11

³² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Hlm. 313

³³ *Ibid.*, Hlm. 314.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ يَكْبُرُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذی)³⁴

Artinya: "Dari Aisyah RA. dari Nabi SAW., bersabda: terangkat qalam (pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar". (HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi).

Adapun berdasarkan penjelasan hadits di atas, maka dapat dilihat ciri-ciri utama seseorang dikatakan sudah masuk usia *baligh* adalah dengan dilihat tanda-tanda seperti sudah bermimpi bagi anak laki-laki, dan sudah mengeluarkan darah *haidh* bagi anak perempuan. Hadits ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *baligh* yaitu dilihat dari segi jumlah umur atau usia seseorang, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *baligh* (alamat *al-baligh*).

UIN SUSKA RIAU

³⁴ Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), Jilid III, Hal. 181. Lihat juga al-Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naysabuny, *Shahih Muslim*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Jilid II, Hlm. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah perbedaan antara batas usia dewasa dalam sistem hukum Islam dan batas usia perkawinan dalam Islam?, intinya definisi dewasa dalam hukum Islam itu sudah dianggap mampu untuk melakukan sesuatu termasuk melangsungkan perkawinan. Biasanya tolak ukur kedewasaan dalam hukum Islam itu bisa dilihat dari tanda-tanda dan juga diukur dari batas usia seseorang. Kedaunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Misalnya ada orang yang dari segi umur belum dewasa namun dari tanda-tanda mereka sudah masuk kategori. Begitu juga sebaliknya dari segi tanda-tanda mereka belum masuk kategori namun dari segi umur mereka sudah masuk kategori, biasanya ini berlaku untuk orang yang mungkin ada kelainan. Demi untuk sebuah kemaslahatan alangkah baiknya untuk melakukan sebuah pernikahan memenuhi dua unsur baik dari segi umur dan tanda-tanda.

Kelihatannya batas usia pernikahan yang diatur dalam sistem hukum nasional kita yaitu usia 19 tahun atau usia 21 tahun sudah memenuhi dua kategori tersebut. Ketika persyaratan sudah terpenuhi, untuk melangsungkan pernikahan sangat lah mudah sekali dan tidak perlu adanya penolakan secara administrasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah. Sebaliknya ketika persyaratan administrasi tidak terpenuhi namun ingin juga melangsungkan pernikahan, hal ini lah yang menjadi penyebab penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi pernikahan, seperti terjadinya nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Batas Usia Dewasa Menurut Psikologi

Mengapa dalam telaah kepustakaan ini perlu dimasukkan usia dewasa menurut psikologi, karena untuk melangsungkan pernikahan perlu sekali untuk mempersiapkan kesiapan fisik yang baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu menurut penulis sangat perlu juga dijadikan sebagai telaah teori tentang bagaimana konsep dewasa menurut sudut pandang psikologi. Karena untuk membangun rumah tangga butuh persiapan psikis yang benar-benar telah matang psikisnya. Karena banyak orang yang ketika belum siap secara psikis, akhirnya dalam menjalin bahtera rumah tangga berakhir dengan perceraian. Penyebabnya adalah pasangan suami istri belum siap secara psikis sehingga terjadi tekanan yang menyebabkan stres, marah yang tidak terbendung antara suami istri serta tidak ada yang mengalah dan akhirnya berujung kepada pemukulan, penganiayaan, perceraian dan yang terparah lagi adalah pembunuhan.

Istilah dewasa merupakan *organism* yang telah matang. Tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang seorang individu akan mengalami masa dimana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa lainnya. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, masa dewasa ialah waktu yang paling lama dalam rentang kehidupan.³⁵

Pengertian kedewasaan dalam kata kerja latin disebut dengan istilah *adult* atau *adolescence* yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata *adult* berasal dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.³⁶ Dewasa dalam bahasa Belanda adalah *Volwassen* yang artinya *Vol* berarti penuh dan *Wassen* berarti tumbuh, sehingga *volwassen* berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh.³⁷ Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.

Dalam studi psikologi perkembangan kontemporer dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup (*life-span development*), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan-perubahan

³⁵ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2011), Hlm

24

³⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta, Erlangga: 1980), Hlm. 246

³⁷ Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 2006), Hlm. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu. Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa status dewasa seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40-45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40-45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.³⁸

5. Batas Usia Dewasa Menurut Medis

Dalam dunia medis atau kedokteran juga perlu dibahas tentang konsep dewasa yaitu kapan seseorang sudah waktunya untuk hamil atau melahirkan keturunan. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan dan meneruskan kelangsungan hidup dan memperbanyak keturunan atau anak. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus, agar dapat berlangsung dengan baik kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai

³⁸ Fieldman Robert S, *Understanding Psychology*, (New York: McGraw Hill, 1996), Hlm. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (yang pada umumnya di dalam rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.³⁹

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia kehamilan adalah masa dimulai saat konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal 280 hari (40 minggu/9 bulan 7 hari) di hitung dari triwulan/trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, trimester/trimester ke-2 dari bulan ke- 4 sampai 6 bulan, triwulan/trimester ke-3 dari bulan ke-7 sampai ke-9.⁴⁰

Manuaba dan kawan-kawan memberikan sebuah definisi kehamilan secara berbeda. Kehamilan adalah suatu mata rantai yang berkesinambungan yang terdiri dari *ovulasi* (pematangan sel) lalu pertemuan *ovum* (sel telur) dan *spermatozoa* (sperma) terjadilah pembuahan dan pertumbuhan zigot

³⁹ Sarwono, S.W, 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 135. Namun menurut ulama Mazhab terjadi perbedaan masa kehamilan terpanjang (ada yang mengatakan 2 tahun yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan ada yang mengatakan 4 tahun yaitu Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal).

⁴⁰ D. Agustin, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada Pekerja Shift di PT Kertas Tirta Industri Cilegon*, (Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012), Hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian bernidasi (penanaman) pada uterus dan pembentukan plasenta dan tahap akhir adalah tumbuh kembang hasil konsepsi sampai *aterm*).⁴¹

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kehamilan adalah proses reproduksi di mana seorang wanita memiliki janin yang terus atau sedang tumbuh bermula dari pertemuan sel telur (*ovum*) pada wanita dan sperma (*spermatozoid*) pada laki-laki kemudian terjadi pembuahan dan pertumbuhansampai dengan janin cukup bulan dan sempurna yaitu jika normal kurang lebih selama 280 hari yaitu 40 minggu atau 9 bulan 7 hari.

Usia seorang wanita pada saat hamil sebaiknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umur yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil harus siap fisik, emosi, psikologi, sosial dan ekonomi.

- a. Usia ibu kurang dari 20 tahun⁴²

Remaja adalah individu antara umur 10-19 tahun. Penyebab utama kematian pada perempuan berumur 15-19 tahun adalah komplikasi kehamilan, persalinan dan komplikasi keguguran. Kehamilan dini mungkin akan menyebabkan para remaja muda yang sudah menikah

⁴¹ Manuaba, dkk, *Pengantar Kuliah Obstetri*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2012), Hlm. 56

⁴² Skripsi Ikhdha Nurur Shofa, *Faktor Usia Terhadap Komplikasi Pada Kehamilan Akibat Kegagalan Kontrasepsi* (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Tambakrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro Jawa Timur), (Jombang: Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, 2017), Hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan keharusan sosial (karena mereka diharapkan untuk membuktikan kesuburan mereka), tetapi remaja tetap menghadapi risiko-risiko kesehatan sehubungan dengan kehamilan dini dengan tidak memandang status perkawinan mereka.

Kehamilan yang terjadi pada sebelum remaja berkembang secara penuh, juga dapat memberikan risiko bermakna pada bayi termasuk cedera pada saat persalinan, berat badan lahir rendah, dan kemungkinan bertahan hidup yang lebih rendah untuk bayi tersebut. Wanita hamil kurang dari 20 tahun dapat merugikan kesehatan ibu maupun pertumbuhan dan perkembangan janin karena belum matangnya alat reproduksi untuk hamil. Penyulit pada kehamilan remaja (< 20 tahun) lebih tinggi dibandingkan kurun waktu reproduksi sehat antara 20-30 tahun. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan (*stress*) psikologi, sosial, ekonomi, sehingga memudahkan terjadinya keguguran.

Manuaba menambahkan bahwa kehamilan remaja dengan usia di bawah 20 tahun mempunyai risiko:

1. Sering mengalami anemia;
2. Gangguan tumbuh kembang janin;
3. Keguguran, prematuritas, atau BBLR;
4. Gangguan persalinan;
5. Preeklamsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perdarahan *antepartum*.

Para remaja yang hamil di negara-negara berkembang seringkali mencari cara untuk melakukan aborsi. Di negara-negara di mana aborsi adalah ilegal atau dibatasi oleh ketentuan usia, para remaja ini mungkin akan mencari penolong ilegal yang mungkin tidak terampil atau berpraktik di bawah kondisi-kondisi yang tidak bersih. Aborsi yang tidak aman menempati proporsi tinggi dalam kematian ibu di antara para remaja.⁴³

b. Usia ibu 20-35 tahun

Pada usia 20-35 tahun resiko gangguan kesehatan pada ibu hamil paling rendah yaitu sekitar 15%. Selain itu apabila dilihat dari perkembangan kematangan, wanita pada kelompok umur ini telah memiliki kematangan reproduksi, emosional maupun aspek sosial. Meskipun pada saat ini beberapa wanita di usia 20 tahun menunda pernikahan karena belum meletakkan prioritas utama pada kehidupan baru tersebut. Pada umumnya usia ini merupakan usia yang ideal untuk anda hamil dan melahirkan untuk menekan resiko gangguan kesehatan baik pada ibu dan juga janin. Selain itu sebuah ahli mengatakan wanita pada usia 24 tahun mengalami puncak kesuburan dan pada usia selanjutnya mengalami penurunan kesuburan akan tetapi masih bisa

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamil.⁴⁴

- c. Usia ibu lebih dari 35 tahun

Risiko keguguran spontan tampak meningkat dengan bertambahnya usia terutama setelah usia 30 tahun, baik kromosom janin itu normal atau tidak, wanita dengan usia lebih tua, lebih besar kemungkinan keguguran baik janinnya normal atau abnormal. Semakin lanjut usia wanita, semakin tipis cadangan telur yang ada, indung telur juga semakin kurang peka terhadap rangsangan gonadotropin. Makin lanjut usia wanita, maka risiko terjadi abortus, makin meningkat karena menurunnya kualitas sel telur atau ovum dan meningkatnya risiko kejadian kelainan kromosom.

Pada gravida tua terjadi abnormalitas kromosom janin sebagai salah satu faktor etiologi abortus. Sebagian besar wanita yang berusia di atas 35 tahun mengalami kehamilan yang sehat dan dapat melahirkan bayi yang sehat pula. Tetapi beberapa penelitian menyatakan semakin matang usia ibu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya beberapa risiko tertentu, termasuk risiko kehamilan.

Para tenaga ahli kesehatan sekarang membantu para wanita hamil yang berusia 30 sampai 40 tahun lebih, untuk menuju ke kehamilan yang lebih aman. Ada beberapa teori mengenai risiko kehamilan di usia 35 tahun atau lebih, di antaranya:

⁴⁴ *Ibid.*, 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wanita pada umumnya memiliki beberapa penurunan dalam hal kesuburan mulai pada awal usia 30 tahun. Hal ini belum tentu berarti pada wanita yang berusia 30 tahunan atau lebih memerlukan waktu lebih lama untuk hamil dibandingkan wanita yang lebih muda usianya. Pengaruh usia terhadap penurunan tingkat kesuburan mungkin saja memang ada hubungan, misalnya mengenai berkurangnya frekuensi ovulasi atau mengarah ke masalah seperti adanya penyakit *endometriosis*, yang menghambat uterus untuk menangkap sel telur melalui tuba *fallopian* yang berpengaruh terhadap proses konsepsi.
2. Masalah kesehatan yang kemungkinan dapat terjadi dan berakibat terhadap kehamilan di atas 35 tahun adalah munculnya masalah kesehatan yang kronis. Usia berapa pun seorang wanita harus mengkonsultasikan diri mengenai kesehatannya ke dokter sebelum berencana untuk hamil. Kunjungan rutin ke dokter sebelum masa kehamilan dapat membantu memastikan apakah seorang wanita berada dalam kondisi fisik yang baik dan memungkinkan sebelum terjadi kehamilan. Kontrol ini merupakan cara yang tepat untuk membicarakan apa saja yang perlu diperhatikan baik pada istri maupun suami termasuk mengenai kehamilan. Kunjungan ini menjadi sangat penting jika seorang wanita memiliki masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan yang kronis, seperti menderita penyakit *diabetes mellitus* atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini, merupakan penyebab penting yang biasanya terjadi pada wanita hamil berusia 30-40an tahun dibandingkan pada wanita yang lebih muda, karena dapat membahayakan kehamilan dan pertumbuhan bayinya. Pengawasan kesehatan dengan baik dan penggunaan obat-obatan yang tepat mulai dilakukan sebelum kehamilan dan dilanjutkan selama kehamilan dapat mengurangi risiko kehamilan di usia lebih dari 35 tahun, dan pada sebagian besar kasus dapat menghasilkan kehamilan yang sehat.

Para peneliti mengatakan wanita di atas 35 tahun dua kali lebih rawan dibandingkan wanita berusia 20 tahun untuk menderita tekanan darah tinggi dan *diabetes* pada saat pertama kali kehamilan. Wanita yang hamil pertama kali pada usia di atas 40 tahun memiliki kemungkinan sebanyak 60% menderita tekanan darah tinggi dan 4 kali lebih rawan terkena penyakit *diabetes* selama kehamilan dibandingkan wanita yang berusia 20 tahun pada penelitian serupa di University of California pada tahun 1999. Hal ini membuat pemikiran sangatlah penting ibu yang berusia 35 tahun ke atas mendapatkan perawatan selama kehamilan lebih dini dan lebih teratur. Dengan diagnosis awal dan terapi yang tepat, kelainan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelainan tersebut tidak menyebabkan risiko besar baik terhadap ibu maupun bayinya.

3. Risiko terhadap bayi yang lahir pada ibu yang berusia di atas 35 tahun meningkat, yaitu bisa berupa kelainan kromosom pada anak. Kelainan yang paling banyak muncul berupa kelainan *Down Syndrome*, yaitu sebuah kelainan kombinasi dari retardasi mental dan abnormalitas bentuk fisik yang disebabkan oleh kelainan kromosom.
4. Risiko lainnya terjadi keguguran pada ibu hamil berusia 35 tahun atau lebih. Kemungkinan kejadian pada wanita di usia 35 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan pada wanita muda. Pada penelitian tahun 2000 ditemukan 9% pada kehamilan wanita usia 20-24 tahun. Namun risiko meningkat menjadi 20% pada usia 35-39 tahun dan 50% pada wanita usia 42 tahun. Peningkatan insiden pada kasus abnormalitas kromosom bisa sama kemungkinannya seperti risiko keguguran. Yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut sebaiknya wanita berusia 30 atau 40 tahun yang merencanakan untuk hamil harus konsultasikan diri dulu ke dokter. Bagaimanapun, berikan konsentrasi penuh mengenai kehamilan di atas usia 35 tahun, diantaranya:
 - a) Rencanakan kehamilan dengan konsultasi ke dokter sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti untuk kehamilan tersebut. Kondisi kesehatan, obat-obatan dan imunisasi dapat diketahui melalui langkah ini;

- b) Konsumsi multivitamin yang mengandung 400 mikrogram asam folat setiap hari sebelum hamil dan selama bulan pertama kehamilan untuk membantu mencegah gangguan pada saluran tuba;
- c) Konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi secara bervariasi, termasuk makanan yang mengandung asam folat, seperti sereal, produk dari padi, sayuran hijau daun, buah jeruk, dan kacang-kacangan;
- d) Mulai kehamilan pada berat badan yang normal atau sehat (tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk). Berhenti minum alkohol sebelum dan selama kehamilan;
- e) Jangan gunakan obat-obatan, kecuali obat anjuran dari dokter yang mengetahui bahwa si ibu sedang hamil.⁴⁵

6. Batas Usia Dewasa Menurut Sosiolog

Dari aspek sosiologis juga sangat perlu kita perhatikan, karena sebuah pernikahan akan berdampak kepada sistem sosial seorang. Ketiak seseorang sudah membangun sebuah keluarga, maka mau tidak mau dan siap tidak siap mereka harus siap hidup bersosial dan membaur bersama masyarakat. Dalam masyarakat barat, periode rentang kehidupan dibagi ke dalam delapan

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 9-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode yang meliputi periode pranatal, bayi dan toddler, kanak-kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa madya, dan dewasa akhir. Terkait dengan perkembangan anak, berikut ini akan diuraikan secara khusus perkembangan anak dari masa pranatal hingga remaja.⁴⁶

a. Periode Pranatal

Dari konsepsi hingga lahir. Periode ini berlangsung kurang lebih sembilan bulan di dalam kandungan. Pada periode ini, perkembangan berlangsung paling cepat, diawali dari satu sel organisme hingga berkembang menjadi janin dengan kapasitas-kapasitas yang penting untuk menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya.

b. Periode Bayi dan *Toddler*

Dari lahir hingga usia 18-24 bulan. Periode bayi adalah masa ketika seseorang tergantung secara ekstrim pada orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan afeksi. Pada masa ini ikatan yang erat dengan orang lain terbentuk untuk pertama kali. Periode bayi berlangsung kurang lebih selama satu tahun pertama kehidupan. Masa selanjutnya, disebut sebagai rentang periode toddler. Pada periode ini, seorang anak mulai mengembangkan otonomi sejalan dengan kemampuannya untuk berbicara dan melakukan mobilitas. Bagaimanapun mereka tetap

⁴⁶ Rini Hildayani, *Modul I Perkembangan Manusia*, (Banten: Jurusan PAUD, Universitas Teuku, 2014), Hlm.16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan orang tua dan pengasuh untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka dalam melakukan berbagai hal.

c. Periode Kanak-Kanak Awal

Berlangsung sekitar usia 2 hingga 6 tahun. Periode kanak-kanak awal sering pula disebut sebagai periode prasekolah. Pada periode ini tubuh menjadi lebih panjang dan lebih ramping. Keterampilan motor juga menjadi lebih baik. Anak-anak pada periode ini lebih mampu mengontrol diri dan mengurus dirinya sendiri. Mereka juga mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah (seperti kemampuan mengikuti instruksi, mengenal huruf), dan menghabiskan banyak waktunya untuk bermain bersama teman. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan berpikir dan bahasa yang luar biasa pada masa ini.

d. Periode Usia Sekolah

Berlangsung sekitar usia 6 hingga 11 tahun. Pada periode ini anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas dan menguasai tanggung jawab baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa. Keutamaan dari periode ini adalah meningkatnya kemampuan atletik, partisipasi dalam permainan yang memiliki aturan, proses berpikir yang lebih logis, penguasaan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung serta kemajuan dalam pemahaman diri, moralitas, dan hubungan persahabatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Periode Remaja

Berlangsung sekitar usia 11 hingga 18 tahun. Periode ini mengawali transisi ke masa dewasa. Pubertas mengarah pada ukuran tubuh orang dewasa dan kematangan seksual. Perubahan fisik berlangsung pesat. Berpikir menjadi lebih abstrak dan idealis. Sekolah mengarah pada persiapan pendidikan di bangku kuliah dan dunia kerja. Remaja juga mulai membangun kemandirian dari keluarga dan mulai menetapkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Tugas perkembangan utama pada masa ini adalah pencapaian identitas.

f. Dewasa Muda

Periode dewasa merupakan periode yang terpanjang dalam keseluruhan life span seorang individu, yaitu antara kurang lebih 18 tahun sampai individu itu meninggal. Menurut E. Hurlock masa dewasa terbagi beberapa periode yaitu:

- 1) Periode dewasa awal (*Early adulthood*): 18 tahun-40 tahun ;
- 2) Periode dewasa madya (*Middle adulthood*): 40 tahun-60 tahun ;
- 3) Periode dewasa akhir (*Late adulthood/old age*): 60 tahun-meninggal.⁴⁷

Perlu diingat bahwa pembagian ini, dengan batasan-batasan usia tersebut, bukannya sudah pasti dan tidak dapat ditawar-tawar lagi,

⁴⁷ Miftahul Jannah, dkk, *Rentang Kehidupan Manusia (Life Span Development) Dalam Islam*, (Jurnal, Volume 3, Nomor 1, tahun 2017, Hlm 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan hanya menunjukkan usia-usia pada saat mana umumnya wanita dan pria dapat diharapkan mulai memperlihatkan adanya perubahan. Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan dalam penampilan, fungsi jasmaniah, minat, sikap atau tingkah laku yang berbarengan dengan masalah penyusuaian diri sehubungan adanya tekanan-tekanan budaya dan harapan-harapan masyarakat yang timbul dari padanya.⁴⁸

Periode dewasa awal sering juga disebut *early adulthood*. Perkataan *adulthood* berasal dari kata kerja *adultus* yang berarti tumbuh dan mencapai ukuran serta kekuatan yang penuh, dengan perkataan lain, menjadi matang. Oleh karena itu orang dewasa adalah individu-individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima statusnya di lingkungan sosial bersama-sama orang-orang dewasa lainnya.⁴⁹

g. Dewasa Madya

Periode ini di tandai dengan munculnya perubahan-perubahan jasmaniah/fisik dan mental, demikian pula di akhiri dengan hal-hal tersebut. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan/tenaga yang sering di ikuti dengan berkurangnya kewaspadaan mental .

Karakteristik usia dewasa madya yaitu:

- 1) Periode usia yang menakutkan;

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Periode transisi;
- 3) Menderita stres (*Time Of Stress*);
- 4) Usia yang membahayakan (*Dangerous Age*)
- 5) Usia yang canggung;
- 6) Masa berprestasi (*Time of Achievement*) ;
- 7) Masa evaluasi (*Time of Evaluation*);
- 8) Masa kebosanan;
- 9) Masa rumah menjadi kosong (*Empty Nest*)

Tugas-tugas perkembangan periode Dewasa madya :

- 1) Mencapai tanggung jawab sosial sebagai orang dewasa dan sebagai warganegara;
- 2) Membimbing anak-anaknya yang remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan yang berbahagia;
- 3) Mengembangkan aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu luang;
- 4) Mengikatkan diri pada suami/istri sebagai pribadi;
- 5) Menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan fisiologi masa dewasa madya;
- 6) Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaannya;
- 7) Menyesuaikan diri terhadap orang tua yang lanjut usia.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., Hlm. 108-111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Dewasa Akhir (Usia 60 tahun sampai meninggal)

Periode dewasa akhir di sebut juga masa tua. Meskipun batas antara masa dewasa madya dan dewasa akhir ialah usia 60 tahun, namun banyak orang yang berusia 60 tahun tidak menunjukkan segala-segala fisik maupun mental dari ketuaan. Mungkin hal ini di sebabkan karena kondisi kehidupan yang lebih baik, sehingga banyak dari kelompok ini baru memperlihatkan gejala-gejala tua setelah mengijak usia 70 tahunan atau paling cepat pada usia 65 tahun. Oleh karena itu ada kecendrungan untuk menetapkan usia 65 tahun sebagai batas awal periode usia tua/lanjut. Karakteristik usia lanjut yaitu sebagai berikut:

- 1) Periode penurunan (kemunduran);
- 2) Perbedaan individual dalam efek ketuaan.
- 3) Banyak terdapat stereotip-stereotip mengenai usia lanjut seperti misalnya: adanya humor-humor dalam majalah-majalah mengenai usia tua, yang menggambarkan masa tua tidak menyenangkan;
- 4) Sikap sosial terhadap usia lanjut;
- 5) Usia lanjut mempunyai status Kelompok Minoritas;
- 6) Usia lanjut diikuti dengan perubahan-perubahan peran.;
- 7) Penyesuaian diri yang tidak baik;
- 8) Ada keinginan untuk peremajaan diri.

Tugas-tugas perkembangan periode dewasa akhir yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyesuaikan diri terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan;
- 2) Menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan penurunan penghasilan;
- 3) Menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidupnya;
- 4) Mengadakan hubungan yang ekspesit dengan anggota kelompok usianya;
- 5) Mengatur dan membuat lingkungan fisik agar hidup menjadi memuaskan;
- 6) Menyesuaikan diri terhadap peran-peran sosial secara fleksibel.⁵¹

7. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat.

Namun tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang batasan usia nikah.

Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan

seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-

Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵¹ Ibid., Hlm. 111-112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S An-Nur: 32).⁵²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir (w. 774 H) dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.⁵³ Al-Maraghy (w. 1371 H) menafsirkan kalimat *washalihin* yaitu para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain.⁵⁴ Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "*washalihin*", yaitu bukan seseorang yang hanya mampu material. Ini karena perkawinan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual, dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih. Bukan sekedar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan istri. Tetapi juga secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon bagi calon perempuan.⁵⁵

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, Hlm. 692

⁵³ Al-Imam Abi Fada' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Hal. 269

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. Ke-7, Jilid 7, Hlm. 538

⁵⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi: 1960), Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Al-Nur 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S An-Nisa: 59).⁵⁶

Surat An-Nisa ayat: 6:

وَابْتََلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah⁵⁷ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah

⁵⁶ Ibid., Hlm. 692

⁵⁷ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S. An-Nisa: 6).⁵⁸

Dalam *Tafsir Rawa'iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam Minal Qur'an* karya Ali as-Shabuny (w. 1442 H) bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani)⁵⁹ maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh.⁶⁰ Dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Al-Maraghi (w. 1364 H) menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *baligh al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, Hlm. 692

⁵⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mu'minun: ayat 13, Al-Hajj: ayat 5, al-Sajadah: ayat 8 dan al-Qiyamah: ayat 37. *Mana* atau *nutfah* terdiri dari dua sel; 1) sel kromosom, jenis laki-laki yang dilambangkan dengan huruf Y. 2) sel kromosom, jenis perempuan yang dilambangkan dengan huruf X. *nutfah* perempuan yang disebut dengan ovum hanya memiliki satu macam sel yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Lihat, Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Hlm. 37-38

⁶⁰ Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Rawa'iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam Minal Qur'an*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Hlm. 153



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha (w. 1354 H), kalimat baligh "*al-nikah*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. KEPADANYA juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya hudud. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan.⁶¹ Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.⁶²

Dalam *Thabaqat al-Syafi'iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.⁶³ Dijelaskan pula dalam *Tafsir al-Munir*, kalimat "*fain anastum minhum rusy*" dan jika menurut kalian mereka telah cerdas (QS. Al-Nisa: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.⁶⁴

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah

⁶¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op., Cit.*, Hlm. 22

⁶² LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kores Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), Hlm. 9.

⁶³ Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, (Bayrut: Alam al-Kutub, t.t.), Jilid Ke-8, Hlm. 47.

⁶⁴ Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir* (Marah Labid), (Mishr: Maktabah Isa al-Habibi, 1314 H), Jilid ke-1, Hlm. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.⁶⁵

Secara ekplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik (w. 179 H), Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm (w. 456 H) berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.⁶⁶

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW., dengan Aisyah (w. 57/58 H) yang berusia 9 (sembilan) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Batasan usia 9 (sembilan) tahun sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan Imam Muslim (w. 261 H) berbunyi:

UIN SUSKA RIAU

⁶⁵ Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), Hlm. 63.

⁶⁶ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Op., Cit.*, Hlm. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمِتَّ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)⁶⁷

Artinya: "Rasulullah Saw menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun (6) dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun". (HR. Muslim).

Sedangkan batasan 15 (lima belas) tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang berbunyi:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَاجَازَنِي (رواه مسلم)⁶⁸

Artinya: "Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 (empat belas) tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 (lima belas) tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)."

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *baligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah usia 15 (lima belas) tahun, meskipun Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada umur 9 (sembilan) tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

⁶⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), Hlm. 595.

⁶⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 (lima belas) tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (sembilan) tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab *Kasyifah al-Saja* dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 (sembilan) tahun". Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat".⁶⁹

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari usia 19 (sembilan belas) tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat ijtihadi. Di samping itu, pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah usia 15 (lima belas) tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar (w. 73 H), dan usia 9 (sembilan) tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW., dengan Aisyah RA. (w. 57/58 H). Berdasarkan hal ini, para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia pernikahan, sebagaimana dijelaskan pada riwayat berikut ini:

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013), H. 82-83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulubulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun".⁷⁰

Pendapat Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dalam usia *baligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.⁷¹ Adapun Imamiyah menetapkan bahwa batas usia seseorang dikatakan sudah *baligh* bagi laki-laki adalah usia 15 (lima belas) tahun dan anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun. Adapun alasan mereka adalah berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:⁷²

⁷⁰ Ibnu Qudomah, *Al-Mughni*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt), Jilid IV, Hal. 78. Lihat juga, Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Al Fikriis, 2009), Hlm. 26.35

⁷¹ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Penerjemah), (Jakarta: Lentera, 2004), Hlm. 312

⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), Hlm. 56-57.

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَا لَهَا وَجَازَ أَمْرَهَا وَأَقِيمَتِ الْحُدُودُ
التَّامَّةُ لَهَا وَإِلَيْهَا⁷³

Artinya: "Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh."

8. Akibat Nikah Dini

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Perkawinan anak ini sangat perlu mendapat perhatian yang sangat serius karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya.⁷⁴

UIN SUSKA RIAU

⁷³ Hadits ini dijelaskan dalam *Kitab Washaya*, Pada bab tidak bolehnya mengambil wasiat pada harta anak yatim sebelum baliq dan bermimpi.

⁷⁴ Jamilah, Reni Kartika Wati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Pemuda, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014), Hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian Plan Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM pada tahun 2011 tentang "Praktik Pernikahan Dini di Indonesia" di delapan wilayah: Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan (TTS) menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin di seluruh wilayah penelitian adalah 16 (enam belas) tahun. Dampak dari perkawinan anak berdasarkan temuan studi, antara lain, terkait dengan kesehatan reproduksi. Ham pir di semua wilayah penelitian, anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, perkawinan anak juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentan KDRT. Menurut temuan Plan, sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dini, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10 sampai dengan 14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20 sampai dengan 25 tahun. Dari data di atas terlihat bahwa pernikahan anak memposisikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dalam kelompok rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.⁷⁵

Secara ilmu medis dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur memang sangat berisiko sekali. Tercatat dari beberapa kasus-kasus kesehatan yang terjadi pada pernikahan terlalu muda atau dini diantaranya adalah kejadian pendarahan yang sangat seirus pada saat persalinan, penyakit anemia, dan komplikasi saat melahirkan. Selain itu juga, perempuan yang hamil pada usia muda sangat berpotensi besar untuk melahirkan anak dengan berat badan anak lahir rendah, kurang gizi dan anemia. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu Sudibyo Alimoeso terdapat korelasi yang tinggi antara fenomena menikah dini dengan tingginya angka kematian ibu akibat persalinan di tanah air. Saat ini rata-rata angka kematian ibu melahirkan di negeri kita cukup tinggi, yaitu kisaran 228 kematian per 100 ribu kelahiran hidup."Kalau rata-rata itu dikalkulasikan, rata-rata setiap satu jamnya terdapat dua kasus kematian ibu. Jika diakumulasikan dalam setahun mencapai kurang lebih 17.520 kasus".Yang berbahaya, kini muncul fenomena tingkat kelahiran di kalangan remaja usia 15 sampai dengan usia 19 tahun malah semakin meningkat. Jika pada tahun 2011 rata-rata remaja usia 15 sampai dengan usia 19 tahun adalah 35 kelahiran per 1.000

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, maka pada tahun 2012 meningkat jadi 48 per 1.000 perempuan.⁷⁶

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.⁷⁷

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu Budi Wahyuni menjabarkan bahwa dari kasus-kasus yang pernah ia tangani, umumnya orang tua menganggap bahwa anak-anak bisa melanjutkan pendidikan dan sekolah setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. Kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarganya, ujar Budi.⁷⁸

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi kesehatan. Dia

⁷⁶ Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Surakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah, 2015), Hlm. 66-67

⁷⁷ Mubasyarah, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Bandung: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016), Hlm. 403

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm. 403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar pada usia muda. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan, 48 orang dari 1.000 remaja putri usia 15-19 tahun sudah melahirkan.⁷⁹

Mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Inang Winarso menambahkan, perkawinan di usia anak memperpanjang usia reproduksi perempuan dan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil. Jika tidak dikendalikan, jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur Indonesia yang pada 2002-2012 stagnan di 2,6 anak sulit diturunkan. Tingginya jumlah kelahiran mempersulit negara meningkatkan kualitas penduduk.⁸⁰

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di beberapa kabupaten atau kotanya. Salah satu indikatornya adalah tidak ada perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur 18 tahun. Namun pada kenyataannya, Indonesia tidak lepas dari kejadian pernikahan di bawah umur atau usia remaja (KPP & PA pada tahun 2012). Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) dalam Profil Anak Indonesia 2012, sebesar 1,62 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin,

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm. 409

⁸⁰ *Ibid.*, Hlm. 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan di Jawa Tengah sebesar 1,47 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin. Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun.⁸¹

Perilaku seksual merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kehamilan usia remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yakni antara usia 10 tahun sampai 19 tahun. Masa remaja yang perlu di perhatikan adalah usia 13-15 tahun. Usia remaja menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi seperti remaja yang selalu ingin coba-coba, pendidikan rendah, pengetahuan yang minim, pekerjaan yang sulit didapat sehingga dampaknya berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi keluarga. Terlebih lagi jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjuran berhubungan seksual sehingga menimbulkan suatu kehamilan. Adanya penolakan keluarga yang terjadi akibat malu, hal ini dapat menyebabkan stress berat. Ibu hamil usia muda lebih banyak memiliki risiko bunuh diri lebih tinggi.⁸²

⁸¹ Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar, Eka Radiyah Oktavia, Widayawati, Widya Hary Cahyati, *Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun*, (Semarang: Higeia Journal Of Public Health Research And Development, Higeia 2 (2) (2018), Hlm. 240

⁸² *Ibid.*, Hlm. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia dibawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia dibawah 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah anak dari ibu muda bertahan hidup hingga tahun pertama, anak dibawah 5 tahun memiliki 28% risiko kematian yang lebih besar. Kejadian kesakitan dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, fisik dan psikis ibu yang belum matang, kurangnya akses bermasyarakat dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan risiko tinggi akan penyakit infeksi. Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan usia kurang dari 20 tahun juga berisiko lahir prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), serta kelainan bawaan atau cacat yang sudah terjadi sejak dalam proses kehamilan.

Kasus BBLR di Jawa Tengah pada tahun 2013 menurut Profil Kesehatan Jawa Tengah mencapai angka 21.573 bayi. Selain tingginya angka BBLR pasangan pernikahan dini juga merupakan salah satu penyumbang tingginya Angka Kematian Bayi dimana di Jawa tengah kasus kematian bayi mencapai 10,75/1000 angka kelahiran hidup dan sudah melampaui batas MDG's dimana 17/1000 angka kelahiran hidup.⁸³

⁸³ *Ibid.*, Hlm. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh IPADI (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia) melalui lembaga kependudukan dan BKKBN tahun 2003 menunjukkan saat ini jumlah usia remaja (12-24 tahun) di Indonesia 42 juta (sekitar 20% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 213 juta jiwa). Dari angka ini 35% adalah pasangan suami isteri, dan dari angka ini sekitar 52% perempuan telah menikah. Ratarata usia pernikahan pertama di Indonesia adalah usia 19 tahun bagi penduduk yang sekarang berusia 20-24 tahun. Bagi penduduk usia 25–29 tahun menikah pada usia 15 tahun adalah 11%, menikah pada usia 18 tahun adalah 18% dan pada usia menikah 20 tahun sebesar 51%.⁸⁴

Di Indonesia diperkirakan angka pertumbuhan penduduknya sebesar 2,5%. Dengan pertumbuhan penduduk 2,5% setahun, bila terjadi terus menerus maka dalam waktu 28 tahun jumlah penduduk Indonesia akan menjadi dua kali lipat. Selain itu faktor kehamilan remaja juga merupakan penyebab meningkatnya pertumbuhan penduduk, di Indonesia 34,5% rata-rata nasional remaja melakukan pernikahan dini karena kehamilan remaja.⁸⁵

Penyebab pernikahan usia dini antara lain pemaksaan dari pihak orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor lingkungan, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi adalah pernikahan usia dini biasanya tidak diikuti dengan

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm. 241

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm. 241

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesiapan keadaan ekonomi. Semakin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan dalam bidang social ekonomi juga akan semakin nyata karena pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah penopang. Pada pernikahan usia dini permasalahan ekonomi akan menjadi alasan utama terjadinya perceraian. Hasil survei awal pada bulan September tahun 2017 yang dilakukan pada 30 orang remaja putri di Kelurahan Pudak Payung, ditemukan 4 orang remaja putri (13,3%) yang kurang mengerti tentang risiko pernikahan dini. Hal ini berimplikasi pada tingginya kejadian usia pernikahan dini dibawah umur 19 tahun di Kelurahan Pudak Payung, padahal di Kota Semarang sudah ada kebijakan tentang Kota Layak Anak.⁸⁶

Menurut penelitian *United Nations Development Economic and Social Affairs* (Undesa) yang dilakukan pada tahun 2010 ditemukan bahwa Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level negara-negara Asean, adapun tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah negara Kamboja.⁸⁷

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan pada tahun 2010, menyebutkan bahwa perempuan muda di Indonesia dengan kisaran usia 10-

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm. 241

⁸⁷ Zainul Anwar, Maulida Rahmah, *Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja*, (Yogyakarta: Jurnal Intervensi Psikologi, Volume 7, Nomor 2, 2015), Hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia kisaran 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia kisaran 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia kisaran 15-19 tahun (11,7% perempuan dan 1,6% laki-laki kisaran usia 15-19 tahun). Di antara kelompok umur perempuan kisaran 20-24 tahun lebih dari 56,2% sudah menikah. Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Sedangkan berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 yang dirilis Kementerian Kesehatan RI.⁸⁸

Menurut Adiningsih dalam *Pikiran Rakyat*, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja sangatlah minim, informasi yang kurang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi sehingga memaksa remaja untuk melakukan eksplorasi sendiri, baik melalui media (cetak maupun elektronik) dan hubungan pertemanan, yang besar kemungkinannya justru salah. Ternyata sebagian besar remaja merasa tidak cukup nyaman curhat dengan orang tuanya, terutama bertanya seputar masalah seks. Oleh karena itu, remaja lebih suka mencari tahu sendiri melalui sesama temannya dan menonton blue film. Selain itu pengetahuan tentang akibat pernikahan dini dan kesiapan secara fisik merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan pada pasangan yang menikah diusia muda terutama pihak wanitanya. Hal ini

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan kehamilan dan proses melahirkan. Secara fisik, tubuh mereka belum siap untuk melahirkan anak dan melahirkan karena tulang panggul mereka yang masih kecil sehingga membahayakan persalinan. Hal tersebut sangat mempengaruhi angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagai standart derajat kesehatan suatu negara.⁸⁹

Menikah diusia dini terutama di bawah usia 20 tahun ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menikah diusia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh pendek atau stunting (kontet). Anak stunting itu tubuhnya pendek, kecil, dan ukuran otak kecil. Risikonya mudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah (BKKBN, tahun 2012).⁹⁰

Berdasarkan hasil Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama.⁹¹

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan (sebahagian/kebanyakan) yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk

⁹⁰ *Ibid.*, Hlm. 3

⁹¹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, (Bandung: Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009), Hlm. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.⁹²

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian *UNICEF* tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.⁹³

Ketidak setaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. 8,13 Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial.

⁹² *Ibid.*, Hlm. 138

⁹³ *Ibid.*, Hlm. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.⁹⁴

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.⁹⁵

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini.

⁹⁴ *Ibid.*, Hlm. 138

⁹⁵ *Ibid.*, Hlm. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.⁹⁶

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.⁹⁷

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena

⁹⁶ *Ibid.*, Hlm. 139

⁹⁷ *Ibid.*, Hlm. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang sangat membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.⁹⁸

Asuhan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas.⁹⁹

Menjadi orang tua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 139

⁹⁹ *Ibid.*, Hlm. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.¹⁰⁰

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.¹⁰¹

9. *Maqashid Syariah*

Adapun kata *maqashid al-syariah* merupakan kata majmuk (*idhafi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah*.¹⁰² Menurut *lughawy* (bahasa), مقاصد الشريعة terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *shari'ah*.

Maqashid adalah bentuk plural dari *maqashid* yang merupakan bentuk kata dari *yaqshidu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.¹⁰³

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hlm. 139

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm. 139

¹⁰² Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idis al- Marbawiy: Arab-Melayu*, (Bandung: al-Ma'arif, tt), Hlm. 136

¹⁰³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), Hlm. 178-179



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara *lughawy* (etimologi), syariah/syariat berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga berarti tempat akan air disungai ¹⁰⁴. Kata syariah terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah surat al-Maidah ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: " Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. ". (Q.S Al-Maidah: 48) ¹⁰⁵.

Surat al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (Q.S Al-Jatsiyah : 18) ¹⁰⁶.

Pada prinsipnya syariah mengandung arti "jalan yang jelas membawa kepada kemenangan". Dalam hal ini, agama Islam yang ditetapkan untuk manusia disebut syariat, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupan mereka di dunia. Adapun dari segi kesamaan antara syariat Islam dengan "jalan air" (seperti dalam pengungkapan

¹⁰⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. I, Hlm. 37

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Hlm. 116

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hlm. 500

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lughawy di atas) terletak pada siapa yang mengikuti syariat jiwanya akan mengalir dan bersih. Allah SWT. menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana ia menjadikan syariat bagi penyebab kehidupan jiwa manusia ¹⁰⁷.

Semula syariat diartikan sebagai hukum-hukum atau segala aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama mereka sendiri. Dengan pengertian semacam ini, syariat diartikan agama sebagaimana disinggung dalam surat Al-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: "Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya". (Q.S Al-Syura: 13) ¹⁰⁸.

Adapun secara istilah para ulama ushul mendefenisikan *maqashid syariah* dengan beberapa defenisi diantaranya:

- a. Al Ghazali (w. 505 H):

نَعْنِي بِالصَّلَاحِ الْمَحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ

¹⁰⁷ Alaidin Koto, *Op. Cit.*, Hlm. 37-38

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hlm. 484

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظُهُ هَذِهِ الْأُصُولَ الْخَمْسَةَ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ
وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Maksudnya: "Yang kami maksudkan dengan masalah adalah menjaga maksud dan tujuan syara' dan tujuan syara' dari makhluk ada lima yaitu menjaga agama mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga akal mereka, menjaga keturunan mereka dan menjaga harta mereka. Maka setiap upaya untuk menjaga lima ushul ini merupakan sebuah masalah, dan setiap yang menghilangkan ushul-ushul ini merupakan sebuah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah adalah sebuah masalah".¹⁰⁹

- b. Menurut Ibnu 'Ashur (w. 1393 H);

الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا
بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُلَاحَظَتَهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

Maksudnya: "Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan syar'i dalam segenap atau sebagian besar pensyariaan dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu dari hukum syariat".¹¹⁰

- c. Menurut Ala al Fasi (w. 1394 H);

الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ
أَحْكَامِهَا

¹⁰⁹ Al Ghazali, *Al-Mustashfa Fi'ilm al-Ushul*, (Beirut al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), Hlm. 74

¹¹⁰ Al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1994), Hlm. 251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya:" Tujuan dari pensyariatan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT yang maha bijaksana pada setiap hukum-hukumnya".¹¹¹

Sementara itu menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436) mengartikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.¹¹²

Menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H), mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah SWT mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹¹³

Sedangkan didalam buku "*Ushul Fiqh*" karangan Satria Effendi (w. 1420 H), *maqasid syariah* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada sebuah kemaslahatan ummat

¹¹¹ Ala al Fasi, *Maqashid as Syariah al Islamiah*, (Beirut: Dar al Ghorbi al Islami, 1992), Hlm.

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Hlm. 1017

¹¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 5 dan 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia.¹¹⁴ Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akherat kelak.¹¹⁵

Pada hakikatnya, *maqashid al-syari'ah* ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam istilah penggunaannya, *maqashid al-syari'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) yang menulis kitab *Ma'khadz al-Syariah*. Imam Malik (w. 179 H) secara tegas menggunakan istilah *maqashid al-syari'ah* di dalam *masterpiece*-nya, yakni lewat kitab *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i (w. 204 H), di dalam kitab ushul fiqh beliau yakni kitab *al-Risalah* dalam bab *ta'lil al-ahkam*, telah memperkenalkan sebagian dari *maqashid kulliyah hifdh al-nafs dan hifdh al-mal* yang selanjutnya dianggap sebagai cikal bakal tema-tema ilmu *maqashid*. Selepas Imam Syafi'i (w. 204 H) kemudian barulah muncul al-Hakim al-Tirmidzy (w. 296 H) dalam karyanya *al-Shalatu wa Maqasiduha*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-Illah*, *'Ilal asy-Sariyyah*, *'Ilal Asy-Sariyyah al-Ubudiyyah dan al-Furuq*. Setelah itu Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir Syayhi (w. 365 H) dalam karyanya *Mahasin al-Syariah*.¹¹⁶

Menurut Ahmad al-Raisuny, ulama yang pertama kali menggunakan istilah *maqashid* di dalam judul karyanya adalah al-Hakim al-Tirmidzy (w. 296 H) lewat karyanya *al-Shalatu wa Maqashiduha*. Kemudian Abu Zayd

¹¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi 1, Cet. Ke-3, Hlm. 233

¹¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 21, Hlm. 61

¹¹⁶ Muhammad Samsudin, *Fiqh Maqasyid (4) Sejarah Perkembangan*, (Surabaya: Nu Online, 2013), Hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Albakhi (w. 322 H) dalam karyanya *al-Imamah al-Ilal liddiyanah* dan *Masalih al Abdan wa al-Anfus*. Berikutnya Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H), menyebut kalimat yang senada dalam judul karyanya, yakni *Mahasin al-Syari'ah*.¹¹⁷

Sepeninggal Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H) muncul Abu Ja'far Muhammad bin AH bin Babawaih al-Saduq al-Qummi (w. 381 H) dalam karyanya *I'lalu al-Syarai' wa al-Ahkam*. Kitab karyanya ini memuat serpihan-serpihan dari *ta'lil al-ahkam* dari berbagai kalangan ulama sezamannya, termasuk dari kalangan Syi'ah. Ulama yang sezaman dengan beliau adalah Abu al-Hasan Muhammad al-Amiry (w. 381 H) yang bertepatan tahun wafatnya sama. Beliau menuliskan karyanya yang membahas fiqh *maqashid* ini dalam kitab *al-I'lam bi Manaqibi al-Islam*. Di dalam kitab ini, beliau sudah membahas tentang masalah *al-Dlaruriyyatu al-Khams* (lima pokok kebutuhan primer yang harus dijaga). Menurutnya, *al-Dlaruriyyatu al Khams* itu terdiri dari *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-mal* (menjaga harta). Kelimanya pada perkembangan berikutnya adalah menjadi tema sentral dari *maqashid al-syara'ah*.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu muncul al-Juwainy (w. 478 H) yang dikenal dengan panggilan Imam Haramain. Al-Juwainy tampil membawakan *maqashid al-syari'ah* ini dalam kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kitab beliau yang lain dalam bidang yang sama antara lain: *al-Waraqat*, *al-Tuhfah*, *al-Asalib fi al-Khilafah*, *al-Kafiyah* dan *al-Durrah al-Mudliyah fi Ma waqa'a min Khilafin baina al-Syafi'iyyah wa al-Hanafiyyah*. Saking hebatnya Al-Juwainy, beliau memiliki dua orang murid yang juga menghasilkan karya besar serupa, yaitu al-Ghazali (w. 505 H) dan Abu al-Qasim al-Qusyairy (w. 514 H). Al-Ghazaly tampil dengan karyanya yaitu *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* yang menawarkan dua metode penjagaan *maqashid al-syari'ah*, yakni 1) melalui *al-wujud* yang berisikan riwayat serta batasan penjagaan (*hifdh*) dan 2) *al-'adam* yang berisikan ketentuan bisa batalnya tanggung jawab penjagaan (*hifdh*). Adapun tentang murid al-Juwainy yang lain, yaitu Abu Al-Qasim al-Qusyairy, karya beliau kelak di kemudian hari menjadi inspirasi bagi al-Syathiby (w. 790 H) untuk menuliskan kitabnya *al-Muwafaqat*, yang sebenarnya berisikan materi kompromistik antara pendapat Abu al-Qasim al-Qusyairy (w. 514 H) dengan kalangan Hanafiyyah di bidang *maqashid*.¹¹⁹

Setelah itu muncul Fakhru al-Din al-Razy (w. 606 H) dengan karyanya *al-Mahsul fi 'Ilm al-Ushul*, al-'Amidy (w. 631 H) dengan karyanya *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, dan 'Izzu al-Din bin Abdu al-Salam (w. 660 H) dengan karyanya *Maqasid al-Shalah*, *Maqasid al-Shaum* dan

¹¹⁹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Setelah itu muncul ulama kenamaan yang lain, yaitu Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) dengan karyanya *al-Furuq*, al-Baidawi (385 H) dengan karyanya *Minhaj al-Wushul ila Ilmi al-Ushul*, Najmudin al-Thufi (w. 716 H) dengan karyanya *Mukhtasar ar-Raudhah al-Qadamiyyah* dan *Ma'arij al-Ushul ila 'ilm al-Ushul*. Setelah al-Thufi muncul Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam kitabnya *Majmu'ah al-Fatwa* dan disusul muridnya yaitu Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dengan karyanya *Ilam al-Muwaqqi'in*. Pasca Ibnu Qayyim, muncullah al-Syathibi (w. 790 H) dengan karyanya *al-Muwafaqat* dan di kalangan fuqaha' kontemporer saat ini muncul tokoh Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) dengan karyanya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* dan al-Qaradhawi dalam karyanya *Fiqh Maqashid al-Syari'ah*. Sebelumnya ada Syekh Ramadhan al-Buthy (w. 1435 H) juga disebut memiliki karya seputar *fiqh maqashid* diantaranya *Dawabith al-Maslahah*.¹²⁰

Setelah era Ibnu Asyur (w. 1393 H) dan Alal al-Fasi (W. 1974) dalam karyanya *Maqasid Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*, ada nama seperti Nuruddin al-Khadimi yang juga ingin menjadikan *Maqasid Syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam karyanya *Abhats fi Maqashid al-Syariah*. *Maqasid Syariah* kemudian banyak dikaji oleh para pemerhati pemikiran hukum Islam dan para ulama dunia seperti Hasan al-Turabi (w. 1437 H) dalam karyanya *Qadaya al-Tajdid: Nahwu Minhaj Usuli*, Jaser Audah dalam

¹²⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyanya *Fiqh al-Maqasid Inat al-Ahkam bi Maqsidiha*, Ahmad al-Raisuni dalam karyanya *Nadariyat al-Maqasid Inda al-Imam al-Shathibi*, Muhammad Khalid Mas'ud dalam karyanya *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shathibi's*, Jamaludin al-Athiyyah dalam karyanya *Nahwa Tafi'il Maqashid Al-Syari'ah*, Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *Kaifa Nata'ammalu Ma'a Al-Qur'an Al-Adzim* dan Taisir *Al-Fiqh (Fiqh Al-'Ilm)*, Ali Jum'ah dalam karyanya diantaranya *Aliyat al-Ijtihad*, Abdul Majid Najjar dalam karyanya *Fiqh Tadaiyyun Fahman wa Tanzilan*, Abdullah bin Bayyah dalam karyanya *Sina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyyat*, dan Abdullah Ahmad An-Na'im dalam karyanya *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*.

Di antara kesekian tokoh dan ulama di atas, tokoh yang detik ini dianggap memiliki sumbangsih besar terhadap perkembangan fiqh maqashid adalah al-Syathiby (w. 790 H). Dari ketiga juz kitab *al-Muwafaqatnya*, beliau membahas secara khusus bab fiqh *maqashid* ini dalam 1 jilid besar juz 2 *al-Muwafaqat fi Ushali al-Syari'ah*. Berbeda dari ulama-ulama sebelumnya yang membahas dalam serpihan sepotong-sepotong. Itulah sebabnya, oleh kalangan sarjana fikih, al-Syathiby (w. 790 H) dijuluki sebagai bapak *fiqh maqashid*. Hasil karyanya menyadarkan banyak pihak mengenai pentingnya perhatian terhadap *maqashid al-syari'ah*. Lewat karyanya juga, banyak tokoh modern seolah mendapatkan inspirasi untuk menelaah bab *maqashid* ini termasuk di antaranya adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Asyur (w. 1393 H). Pada akhirnya, Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) mempromosikan keberadaan fiqih *maqashid* ini sebagai wahana disiplin ilmu baru dalam penggalan 'illat (alasan dasar) hukum terpisah dari fiqih dan cabangnya.¹²¹

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah primer, sekunder dan tersier.¹²²

Pertama adalah kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat kelak.¹²³ Menurut Al-Syatibi (w. 790 H) ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta.¹²⁴

Kedua adalah kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana dan bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama, Cetakan Ke-4,

222

¹²³ Satria Effendi, *Op.Cit.*, Hlm. 234

¹²⁴ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul al-Wahhab Khallaf (w. 1375 H)) adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.¹²⁵

Ketiga adalah kebutuhan *thasiniyat* ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi (w. 790 H), hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.¹²⁶ Menurut Abdul Wahab Khallaf (w. 1375 H), jika tiga peringkat kebutuhan di atas, masing-masing *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat.¹²⁷

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a. Dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya;

¹²⁵ *Ibid.*, Hlm. 235

¹²⁶ *Ibid.*, Hlm 236

¹²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah, tt),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.¹²⁸

Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan diatas, maka dapat diperhatikan pada contoh berikut ini:

1. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat;
2. Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad;
3. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum;
4. Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat;
5. Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu;
6. Menjaga akal dari segi *al-'adam* misalnya had bagi peminum minuman keras (khamar);
7. Menjaga keturunan dari segi *al-wujud* misalnya nikah;
8. Menjaga keturunan dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*;
9. Menjaga harta dari segi *al-wujud* misalnya melakukan jual beli dan mencari rezeki;
10. Menjaga harta dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.¹²⁹

¹²⁸ Al-syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H), Jilid III, Hlm. 62, 64 dan 70
¹²⁹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urutan kelima *al-maqashid al-khamsah* ini bersifat ijtihadi bukan *naqli*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqla'*. Para ulama ushul fikihpun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal urutan kelima *al-maqashid al-khams* ini, contohnya dalam merangkai kelima *al-maqashid al-khams* ini, Imam Syathibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syathibi (w. 790 H) tetap selalu mengawalinya dengan *al-din* dan *al-nafs* terlebih dahulu.¹³⁰

Imam al-Zarkasyi (w. 794 H) menyebut urutan *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

- a. *al-nafs* (jiwa);
- b. *al-mal* (harta);
- c. *al-nasl* (keturunan);
- d. *al-din* (agama), dan;
- e. *al-aql* (akal).¹³¹

Sementara menurut Imam al-'Amidi (w. 631 H) urutan *maqashid syariah* adalah:

1. *al-din* (agama);

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1983), Jilid VI, Hlm. 612.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *al-nafs* (jiwa);
3. *al-nasl* (keturunan);
4. *al-aql* (akal), dan;
5. *al-mal* (harta).¹³²

Sedangkan menurut Imam al-Qarafi (w. 684 H) urutan *maqashid syariah* adalah:

- a) *al-nufus* (jiwa);
- b) *al-adyan* (agama);
- c) *al-ansab* (keturunan);
- d) *al-'uqul* (akal), dan;
- e) *al-amwal* atau *al-a'radh* (harta).¹³³

Berbeda menurut Imam al-Ghazali (w. 505 H) urutan *maqashid syariah* adalah:

- 1) *al-din* (agama);
- 2) *al-nafs* (jiwa);
- 3) *al-aql* (akal);
- 4) *al-nasl* (keturunan), dan;
- 5) *al-mal* (harta).¹³⁴

¹³² Saefuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo, Muassasah al-Halabi, 1976), Juz IV, Hlm. 252

¹³³ Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, t.th), Hlm. 391

¹³⁴ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz I, Hlm. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.¹³⁵ Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.¹³⁶

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari (1) pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah: *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. *Kedua*, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan

¹³⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), Hlm. 85

¹³⁶ *Ibid.*, Hlm. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari-hari. *Kedua*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman terhadap hukum Islam sebagai sebuah metodologinya.¹³⁷

Rasyid Ridha (w. 1354 H) dalam karyanya ketika berbicara tentang maksud-maksud Al-Qur'an (*maqasyid Al-Qur'an*) di dalam karyanya yang terkenal, *Al-Wahyu Al-Muhammady*, dia menyebutkan maksud-maksud syariat dengan cara yang berbeda dengan cara yang digunakan oleh para ahli ushul fikih tentang tiga derajat maslahat yaitu: *adh-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, *at-tahsiniyyat*. Dia menjelaskan maksud-maksud syariat sesuai dengan tema-tema yang menjadi ajaran Islam dan maksud-maksud besar yang ingin direalisasikan oleh Al-Qur'an dalam kehidupan umat. Rasyid Ridha (w. 1354 H) telah membuat sepuluh maksud untuk memperbaiki manusia:

1. Memperbaiki tiga rukun agama;
2. Menjelaskan kenabian, ajaran, dan fungsi ajaran agama yang tidak diketahui oleh manusia, siapa saja-diantara mereka-yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh (Surat Al-Maidah: 69);
3. Menjelaskan bahawa Islam adalah agam fitrah, akal, ilmu, hikmah, petunjuk, kebebasan, dan kemerdekaan;

¹³⁷ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 61-62



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Reformasi sosial, kemanusiaan dan politik dengan merealisasikan terhadap kelompok delapan;
5. Menegaskan keistimewaan-keistimewaan Islam ketika membebaskan kewajiban. Baik dalam ibadah maupun hal-hal yang dilarang;
6. Menjelaskan dasar-dasar hubungan internasional di dalam Islam;
7. Melakukan perbaikan ekonomi;
8. Melakukan perbaikan sistem peperangan, menolak kejelekan dan membatasinya hanya dalam hal yang bisa memberikan kebaikan kepada manusia;
9. Memberikan seluruh hak wanita. Baik kemanusiaan, agama dan sipil;
10. Membebaskan hamba sahaya.¹³⁸

Sedangkan dalam buku yang berjudul *Kaifa Nata'amal ma'a Al-Qur'an Al-Azhim* (Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Azim) disebutkan tujuan maksud-maksud syariat:

1. Memperbaiki akidah tentang konsep Tuhan, agama dan balasan;
2. Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah;
3. Mengajak agar beribadah dan takwa kepada Allah;
4. Menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak;
5. Membangun keluarga saleh dan memberikan keadilan kepada wanita;

¹³⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqi Maqasyid Maqasyid*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Membangun umat yang bersaksi bagi kemanusiaan;
7. Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerja sama.¹³⁹

Dalam buku yang berjudul *Madkhal li MA'rifah Al-Islam* (Pengantar Studi Al-Qur'an) telah dijelaskan hal diatas dengan rincian yang terdiri dari empat perkara dasar:

1. Dasar-dasar asasi di dalam Islam;
2. Karakteristik-karakteristik asasi di dalam Islam;
3. Maksud-maksud asasi di dalam Islam;
4. Sumber-sumber asasi di dalam Islam.

Maksud-maksud dan tujuan-tujuan asasi Islam terdiri dari:

1. Membangun manusia soleh;
2. Membangun keluarga soleh;
3. Membangun masyarakat soleh;
4. Membangun umat soleh.
5. Mengajak kepada kemanusiaan.

Al-Kulliyah al-khams lain di atas ingin direalisasikan oleh Islam dalam kehidupan manusia. Sehingga, hukum-hukum pun bergantung kepadanya.¹⁴⁰

Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa konsep *maqashid al-syari'ah* sebetulnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial. Menurutnya, *maqashid* umum ialah

¹³⁹ *Ibid.*, Hlm. 26

¹⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashid yang diambil oleh syari'at dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syari'at. Contohnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan. *Maqashid* khusus ialah *maqashid* yang diambil oleh syari'at dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu atau dalam bab-bab kecil yang serupa, seperti *maqashid* dalam ibadah, mu'amalah, dan jinayah. Contohnya berupa hukum kekeluargaan dan kewarisan. Sedangkan *maqashid* parsial ialah *maqashid* yang diambil oleh syari'at dalam menentukan hukum tertentu atau apa yang dimaksudkan oleh syar'i dalam setiap hukumnya meliputi wajib, haram, sunnah, dan makruh. Contohnya yaitu *maqashid* khusus dalam hal wudlu, shalat, jual-beli, atau dalam hal *furu'* lainnya.¹⁴¹

Al-Syatibi (w. 790 H) menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami maksud dari *maqashid al-syari'ah*, antara lain:

- a. Mempertimbangkan makna *dhahir* lafaz

Makna *dhahir* adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah*.¹⁴² Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid al-*

¹⁴¹ Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: Ma'had al-Fikr al-Islami, 1995), Hlm. 15.

¹⁴² Syamsul Bahri,dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), Cet. I, Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'ah adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa.¹⁴³ Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (*ditakwilkan*) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari'at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.¹⁴⁴

Metode ini dipelopori oleh Imam Abu Dawud al-Dhahiri (w. 270 H), seorang pendiri dari aliran *al-Dhahiriyah*. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teks-teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syari'at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.¹⁴⁵

- b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al-syari'ah* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash

¹⁴³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt), Juz II, Hlm. 297

¹⁴⁴ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hlm. 123

¹⁴⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at Islam.¹⁴⁶ Al-Syatibi (w. 790 H) menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok *al-Bathiniyah*, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam

- c. Menggabungkan makna *dhahir*, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *dhahir*, kandungan makna. Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna *dhahir*, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan, *illah* perintah dan, *illah* larangan, analisis terhadap sikap diam syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thabi'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.¹⁴⁷

B. Tinjauan Kepustakaan

Sampai dengan disusunnya disertasi penelitian ini, penulis tidak menemukan atau menjumpai terkhusus di Pascasarjana Universitas Islam Negeri

¹⁴⁶ Syamsul Bahri, *Op., Cit.*, Hlm. 110

¹⁴⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Op., Cit.*, Hlm. 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulthan Syarif Kasyim Riau sebuah penelitian disertasi yang judulnya sama dengan penelitian yang penulis tulis saat ini. Kajian tentang dispensasi nikah memang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti (skripsi-tesis) sebelumnya. Berikut ini hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan (berhubungan) dengan dispensasi nikah:

1. Penelitian berupa skripsi mahasiswa atas nama Hendra dengan judul "Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016 PA.SJ), Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan rumusan masalah (a) bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah nomor: 135/Pdt.P/2016 PA.SJ) dan; (b) bagaimana kedudukan putusan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah nomor: 135/Pdt.P/2016 PA.SJ) dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.
2. Penelitian jurnal atas nama Mutsila Sofyan Tafiq dengan judul "Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Diawah Umur (Studi perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012PA. Pasuruan)", Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012, dengan rumusan masalah (a) bagaimana proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan dan; (b) Bagaimana tinjauan *masalah* dikabulkannya dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan.

3. Penelitian jurnal atas nama Miswar Nafi' dengan judul "Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah", Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Tulungagung, tahun 2011, dengan rumusan masalah (a) Apa dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon; (b) Bagaimana penetapan hakim dalam dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung dan (c) Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung.

4. Penelitian berupa skripsi mahasiwa atas nama Muhammad Amrullah dengan judul Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 38/Pdt.P/2015/PA. RTU), Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tahun 2016, dengan rumusan masalah (a) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menolak perkara nomor 38/Pdt.P/2015/PA. RTU; (b) apa dasar hukum hakim pengadilan Agama Rantau dalam memutus perkara dispensasi nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian berupa skripsi mahasiswa atas nama Fadilatus, dengan judul analisis dispensasi nikah dan kaitannya dengan tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama jepara, jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Swasta Nahdatul Ulama Jepara, dengan rumusan masalah (a) apa saja faktor-faktor penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara (b) apa saja faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.

Berdasarkan gambaran dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelum penulis, dapat penulis jelaskan bahwa yang membedakan dan menjadi nilai tambah dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya atau lainnya adalah penulis membahas secara langsung empat hal yaitu (a) dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para Pemohon; (b) pengaruh dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para Pemohon; (c) pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur diajukan oleh para Pemohon ditinjau menurut *maqâshid syari'ah*. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa akan menghasilkan *output* penelitian yang sangat jauh berbeda dengan penelitian lainnya dan lebih mendekati kepada penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sempurna untuk menjawab dari permasalahan perkara dispensasi nikah. Apalagi putusan permohonan dispensasi nikah yang penulis analisis cukup banyak yaitu 26 perkara. Sementara kelemahan dari penelitian sebelumnya, mereka hanya melihat dari aspek hukum formil (umum) saja tanpa dianalisis dengan pisau atau sudut pandang hukum agama (Islam) terkhusus dalam hal ini adalah analisis menurut *maqasyid syariah*. Kemudian pembahasan penelitian sebelumnya agak sempit dan terlalu dangkal seperti hanya membahas satu kasus saja dalam masalah perkara dispensasi nikah sehingga tidak bisa mewakili dan disimpulkan secara general (umum) dari kasus-kasus yang lain yang berhubungan dengan dispensasi nikah. Apalagi penelitian sebelumnya hanya dalam bentuk skripsi-tesis yang artinya penelitian ini hanya mendeskripsikan dan menganalisis dari sebuah kasus atau permasalahan belum masuk kepada ranah menguatkan atau membantah sebuah teori yang ada dari perkara dispensasi nikah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹.

Menurut Iqbal Hasan metodologi penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, teliti dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya).²

Sedangkan menurut Sujoko, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan atau memaparkan tentang cara mengumpulkan data dan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 23

² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi. Aksara, 2004), Hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis data.³ Adapun untuk metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah berupa disertasi yang berjudul "Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut *Maqasyid Syariah* (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)" terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah *etnografi* atau *participan observation*⁴. Menurut Iqbal Hasan, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden atau bisa disebut juga dengan objek atau lokasi untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkalis yang beralamat di Jalan Lembaga, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.

3. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah adanya ketersediaannya sumber data. Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.

³ Sujoko, Stevanus, dan Yuliawati, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*, (Jakarta: Ghalia, 2007), Hlm 7

⁴ Lihat, W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th, Hlm. 363

⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian hukum lapangan data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:⁶

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁷ Data primer diambil melalui wawancara dan analisa putusan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2018 yang berhubungan dengan dispensasi nikah;
2. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Wawancara dengan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara;
5. Wawancara dengan Pemohon atau Termohon yang mengajukan dispensasi nikah;

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 114

⁷ M. Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, Hlm. 82

⁸ *Ibid.*, Hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁹ Data sekunder diambil berupa buku (kitab), catatan, transkrip, jurnal, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁰ Buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqh Sunnah*, karangan Said Sabiq;
2. Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhi*, karangan Wahbah Az-Zuhaili;
3. Kitab *al-fiqh ala mazahib al-arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziri;
4. Buku Hukum Acara Pradilan Agama, karangan Royhan A. Rasyid;
5. Buku Kompetensi dan Wewenang Pengadilan Agama, karangan M. Yahya Harahap;
6. Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang dispensasi nikah;
7. Buku-buku lain-lainnya (yang berhubungan dengan pembahasan dispensasi nikah).

⁹ M. Iqbal Hasan *Op.Cit.*, Hlm. 58

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. cit.*, Hlm 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data Tersier

Merupakan data mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah :

1. Kamus Arab;
2. Kamus bahasa;
3. Kamus hukum Islam;
4. Ensiklopedi

4. Objek Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, juga sangat perlu diperhatikan objek sebagai sarana penelitian. Menurut Husen Umar pengertian objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian akan dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.¹¹

Sementara itu menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹²

Sedangkan menurut I Made Wiratha pengertian objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor

¹¹ Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Hlm. 303

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.¹³ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dispensasi nikah ditinjau menurut *maqasyid syariah* (studi analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis).

5. Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan obyek penelitian apabila seseorang akan meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi¹⁴. Populasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari unit-unit elementer atau populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat referensi¹⁵. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua perkara yang berhubungan dan berkaitan dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2018.

Sampel diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi¹⁶. Sampel adalah kumpulan dari unit sampling¹⁷. Adapun pengertian lain dari sampel adalah sebagian atau wakil

¹³ I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), Hlm. 39

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Hlm. 108

¹⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hlm. 327

¹⁶ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003, Edisi V, Hlm, 68

¹⁷ Moh. Nasir *Op.cit.*, Hlm . 328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi yang diteliti¹⁸. Penulis menggunakan *purposive sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah.¹⁹

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengidentifikasi wacana dari kitab-kitab, buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang sispensasi nikah telaah *maqasyid syariah* (studi analisis putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Loc.cit.*,

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op., Cit.*, Hlm. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰

Selain itu analisis sebuah data dapat disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.²¹ Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Deskripsi

Metode deskripsi adalah sebuah sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek²².

b. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* adalah metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki²³. Menurut Weber, Content Analysis

²⁰ Sugiono, *Op., Cit.*, Hlm. 244

²¹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermis, 1991), Hlm 126

²² Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), Hlm. 23

²³ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991), Hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shohih dari sebuah dokumen.²⁴

Sementara menurut Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁵

c. Analisis Kritis

Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan.²⁶ Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena dengan penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelami dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya.

8. Metode Pembahasan

Metode pembahasan merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan dapat masalah yang ada kaitannya dengan obyek yang

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. Ke-16, Hlm. 163

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), Cet. 5, Hlm.. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti. Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka sangat diperlukan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Metode induktif

Yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus dan kongkrit, kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

b. Metode deduktif

Yaitu sebuah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum itu hendak menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus.²⁸

c. Metode komparasi

Yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan yang lain, dan penyelidikan bersifat komparatif.²⁹

B Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Bengkalis

Sebelum Proklamasi kemerdekaan sebagian besar daerah kabupaten Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Kerajaan Siak, kecuali Pulau Bengkalis justru langsung dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Khusus

²⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tazkia, 1990), Hlm. 139

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : ANDI, 2004), Hal. 42

²⁹ Winarno Surachman, *Op., Cit.*, Hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pulau Bengkalis yang terdiri dari beberapa kepenghuluan untuk menyelesaikan masalah salah NTCR/Waris, Mal Waris bagi Masyarakat yang beragama Islam Pemerintah Belanda mengangkat seorang Imam (*Qadhi*) yang lebih dikenal dengan Penghulu Landraad. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat maka Penghulu *Landraad* tersebut diberi wewenang untuk mengangkat Qadhi-Qadhi kampung yang bertanggung jawab penuh kepada penghulu landraad tersebut.³⁰

Adapun diluar pulau bengkalis dinamakan tanah *landraad* (Kerajaan Siak) meliputi :

- a. Kecamatan Siak Sri Indrapura;
- b. Kecamatan Tebing Tinggi;
- c. Kecamatan Merbau;
- d. Kecamatan Sungai Apit;
- e. Kecamatan Bukit Batu;
- f. Kecamatan Rupat;
- g. Kecamatan Bangko;
- h. Kecamatan Tanah Putih;
- i. Kecamatan Kubu.³¹

Masalah NTCR /Waris mal waris dikelola langsung oleh kerajaan siak yang dipegang oleh seorang Qadhi Besar, oleh sultan Siak Qadhi Besar ini

³⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Bengkalis, diambil dan ditulis kembali pada tanggal 19 Oktober 2019. Selain itu juga bisa diakses melalui halamn web: <https://www.pa-bengkalis.go.id/>.

³¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi hak dan wewenang untuk mengangkat Imam-Imam (Qadhi) Distrik ditiap-tiap ibu kota kecamatan dalam wilayah Kerajaan Siak tersebut. Dengan semikian baik Pulau Bengkalis maupun untuk daerah kerajaan Siak masalah NTCR /waris mal waris tidak ada kesuliatan. Keadaan yang seperti ini dapat berjalan dengan baik sampai kepada rasis jepang dan Revolusi Kemerdekaan.³²

Pada tahun 1946 datang instruksi untuk membentuk Pejabat Agama ditiap-tiap kewedanaan yaitu meliputi Kewedanaan sebagai berikut:

1. Kewedanaan Bengkali;
2. Kecamatan Bengkalis;
3. Kecamatan Bukit Batu;
4. Kecamatan Rupat;
5. Kewedanaan Tebing Tinggi;
6. Kecamatan Tebing tinggi;
7. Kecamatan Merbau;
8. Kewedanaan Siak;
9. Kecamatan Siak Sri Indrapura;
10. Kecamatan Sungai Apit;
11. Kecamatan Mandau;
12. Kewedanaan Bagan Siapi-Api;
13. Kecamatan Bangko;

³² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kecamatan Tanah Putih;

15. Kecamatan Kubu.³³

Pada tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Kota Bengkalis yang terdiri dari:

- a. Bagian Urusan Agama;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Kemasjidan;
- d. Bagian Ibadah Sosial.³⁴

Bagian hukum/kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis mengangkat P.3 NTCR di tiap-tiap desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan untuk menolong para Isteri yang suaminya melanggar taklik thalak, maka setiap P.3 NTCR yang cakap lagi berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taulif taklik talak.³⁵

Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR/waris mal waris tetap berjalan baik walaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 1957 hak menerima taulif taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya timbullah keluhan dan kesulitan bagi para isteri yang suaminya melanggar taklik talaknya. Akan tetapi kesulitan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dipulihkan kembali oleh karena dalam bulan Mei 1959 Bapak

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah Nur Kepala Bagian Hukum/Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang juga salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah dipanggil ke Jakarta untuk dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Bengkalis. Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis serta Penguasa perang setempat maka pada tanggal 7 Juli 1959 diresmikanlah berdirinya Pengadilan Agama Bengkalis dengan wilayah Yuridiksinya sebagai berikut:³⁶

1. Kecamatan Bengkalis;
2. Kecamatan Tebing Tinggi;
3. Kecamatan Merbau;
4. Kecamatan Bukit Batu;
5. Kecamatan Dumai;
6. Kecamatan Rupat;
7. Kecamatan Bangko;
8. Kecamatan Kubu;
9. Kecamatan Tanah Putih.³⁷

Adapun Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Akan tetapi dengan dikeluarkan surat Dirjen Bimas Islam pada

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 29 Januari 1977 dengan Nomor: DIV/D.3/1016, maka daerah Hukum Pengadilan Agama Bengkalis meliputi Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bengkalis (12 Kecamatan) yaitu:

- 1) Kecamatan Bengkalis;
- 2) Kecamatan Bukit Batu;
- 3) Kecamatan Sungai Apit;
- 4) Kecamatan Siak Sri Indrapura;
- 5) Kecamatan Tebing Tinggi;
- 6) Kecamatan Merbau;
- 7) Kecamatan Dumai;
- 8) Kecamatan Mandau;
- 9) Kecamatan Rupat;
- 10) Kecamatan Bangko;
- 11) Kecamatan Tanah Putih;
- 12) Kecamatan Kubu.³⁸

Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka Kecamatan tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah Hukum Pengadilan Agama Selat Panjang. Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung/Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran 1977/1978 diatas tanah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Bengkalis seluas 27 x 25 m dengan kontrukdi semi permanen.

³⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang terletak di jalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan gedung tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1979 oleh Bapak H. Ichtiyanto, SA.S.H Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Pengadilan Agama Bengkalis berdiri pada tahun 1959 akan tetapi belum mempunyai gedung tersendiri dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain oleh karena pada ketika itu statusnya masih menumpang atau menyewa dan pada November 1977 Pemda Bengkalis meminjamkan sebuah Gedung kepada Departemen Agama Kabupaten Bengkalis serta Pengadilan Agama Bengkalis. Dan pada tahun 1980 kecamatan Dumai diresmikan menjadi kota Administratif, maka kecamatan Dumai dipecah menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Dumai Timur;
- b. Kecamatan Dumai Barat
- c. Kecamatan Bukit Kapur.³⁹

Dengan demikian Daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3 Kecamatan. Dan kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan sehingga kecamatan Rupat dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dumai. Dengan Demikian Daerah wilayah Yuridiksi Pengadilan

³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Bengkalis sampai sekarang menjadi 16 Kecamatan yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkalis;
2. Kecamatan Bengkalis;
3. Kecamatan Bantan;
4. Kecamatan Bukit Batu;
5. Kecamatan Siak Kecil;
6. Kecamatan Mandau;
7. Kecamatan Pinggir;
8. Kecamatan Rupat;
9. Kecamatan Rupat Utara;
10. Kabupaten Siak;
11. Kecamatan Sungai Apit;
12. Kecamatan Sabak Auh;
13. Kecamatan Siak;
14. Kecamatan Tualang;
15. Kecamatan Koto Gasib;
16. Kecamatan Minas;
17. Kecamatan Dayun;
18. Kecamatan Lubuk Dalam.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar nama-nama pimpinan kantor pengadilan agama Bengkalis

dari masa ke masa:

1. Mulai dari 7 Juli 1959 sampai Juni 1971

N a m a : Abdullah Nur
 Jabatan : Ketua
 Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis/Tahun 1908
 Pendidikan : *Gouvernement* dan Aliyah Agama
 Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I (II/d)

2. Mulai dari Juni 1971 sampai 15 Mei 1977

N a m a : Hasanuddin HS
 Jabatan : Ketua
 NIP : 150108036
 Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis/22 Maret 1922
 Pendidikan : Tsanawiyah Tahun 1950
 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

3. Mulai dari 20 April 1977 sampai 24 Desember 1979

N a m a : Amran Ramli
 Jabatan : Ketua
 NIP : 150 169 910
 Tempat /Tanggal Lahir : Bengkalis/26 Februari 1950
 Pendidikan : PGAN 6 Tahun
 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mulai ari 24 Desember sampai 1987

N a m a	: Drs. Buchori Ras
Jabatan	: Ketua
NIP	: 150 110 727
Tempat/Tanggal Lahir	: Air Tiris/11 November 1944
Pendidikan	: Sarleng IAIN Syari'ah Tahun 1972
Pangkat/Golongan	: Penata Muda (III/a)
5. Mulai dari 1987 sampai 1998

N a m a	: Drs. Lumban Hutabarat
Jabatan	: Ketua
NIP	: 150108036
Tempat/Tanggal Lahir	: Bengkalis/22 Maret 1922
Pendidikan	: Tsanawiyah Tahun 1950
Pangkat/Golongan	: Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
6. Mulai dari 1998 sampai 2008

N a m a	: Drs. Syahril
Jabatan	: Ketua
NIP	: 150108036
Tempat/Tanggal Lahir	: Bengkalis/22 Maret 1922
Pendidikan	: Tsanawiyah Tahun 1950
Pangkat / Golongan	: Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mulai dari sampai Tahun 2008

N a m a : Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua

NIP : 150108036

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis/22 Maret 1922

Pendidikan : Tsanawiyah Tahun 1950

Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

8. Mulai dari 2008 sampai Desember 2011

N a m a : Drs. H.M. Yunus Rasyid, SH

Jabatan : Ketua

NIP : 150108036

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis/22 Maret 1922

Pendidikan : S-2

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)

9. Mulai dari 28 Desember 2011 sampai 26 Agustus 2013

N a m a : Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua

NIP : 19640809 198502 1 003

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung,

Pendidikan : S-2

Pangkat/Golongan : Pembina TK. I (IV/b)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Mulai dari 26 Agustus 2013 sampai 2015

N a m a : Drs. Erlis, S.H
 Jabatan : Ketua
 NIP : 19
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pendidikan : S-1
 Pangkat/ Golongan : Pembina Muda TK.I (IV/b)

11. Mulai dari 2016 sampai September 2018

N a m a : Drs. M. Taufik, M.H
 Jabatan : Ketua
 NIP : 19
 Tempat /Tanggal Lahir :
 Pendidikan : S-2
 Pangkat / Golongan : Pembina TK.I (IV/b)

12. Mulai dari September 2018 sampai Sekarang

N a m a : Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H
 Jabatan : Ketua
 NIP : 19
 Tempat /Tanggal Lahir : Palembang
 Pendidikan : S-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkat / Golongan : Pembina TK.I (IV/b).⁴¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bengkalis

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun

⁴¹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. *Waarmeking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁴²

Pengadilan Agama Bengkalis, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis Pekanbaru, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Bengkalis mempunyai mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonsia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

⁴² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁴³

Tugas pokok Pengadilan Agama Bengkalis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

⁴³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah.⁴⁴

Selain kewenangan tersebut, pasal 52a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Penjelasan lengkap pasal 52a ini berbunyi: "Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

⁴⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan Hukum Islam.⁴⁵

Berdasarkan tugas pokok dimaksud di atas, untuk melaksanakannya, Pengadilan Agama Bengkalis mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap

⁴⁵ *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
(*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengakapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 *jo.* KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007);
6. Fungsi Lainnya:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi di Pengadilan yang diperbaharui dengan KMA No. 1 – 144/KMA/SK/I/2011.⁴⁶

Pengadilan Agama merupakan organisasi kolegal yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

1) Unsur Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Agama Bengkalis pada akhir Tahun 2015 terjadi perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana pada Perma tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkalis.⁴⁷

2) Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini dilaksanakan oleh Majelis

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim dan dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Agama.⁴⁸

3) Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama, di bawah kewenangan Panitera maupun Sekretaris Pengadilan Agama. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Unit Kerja Kepaniteraan dan Unit Kerja Kesekretariatan.⁴⁹

4) Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Wapan) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan; Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan; dan Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara,

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan perkara, dan perkara -perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).⁵⁰

5) Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha Pengadilan Agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubbag Umum dan Keuangan; dan Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan. Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992.⁵¹

Uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkalis yang telah disajikan sebelumnya, Pengadilan Agama Bengkalis melaksanakan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian kesekretariatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Bengkalis baik dalam bidang kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan, menetapkan target pencapaian pelaksanaan tugas, menentukan arah kebijakan umum, melakukan eksaminasi, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tugas dengan baik.

Jabatan Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkalis;
- b. Menetapkan sasaran setiap kegiatan;
- c. Menetapkan dan menjadwalkan kegiatan dan rencana kegiatan;
- d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Bengkalis;
- f. Menentukan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan dalam mewujudkan visi dan misi;
- g. Mengadakan rapat dinas;
- h. Menetapkan rumusan kebijakan dan kegiatan Pengadilan Agama Bengkalis;
- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis;
- k. Mengadakan konsultasi dengan ketua Pengadilan Agama Bengkalis Pekanbaru bila diperlukan;
- l. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melaksanakan kegiatan perkara;
- m. Melakukan tugas Hakim untuk sidang serta bertanggung jawab terhadap berkas perkara Pengadilan Agama dan minutasinya;
- n. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan;
- o. Mengisbatkan dan menentukan tim Hisab Rukyat Hilal Pengadilan Agama Bengkalis;
- p. Menunjuk dan menentukan rohaniawan untuk mendampingi penyempahan pejabat/pegawai serta memberikan nasihat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- q. Membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten atau instansi lainnya;
- r. Memberi penilaian/mengesahkan SKP sesuai kewenangannya;
- s. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan langsung;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

t. Melaporkan pelaksanaan tugas Peradilan Agama kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis.⁵²

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, bertugas bersama Ketua Pengadilan Agama Bengkalis merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Pertama dengan cara melaksanakan beberapa kegiatan berupa perencanaan (*planning* atau *programing*), pelaksanaan (*executing*), pengawasan (*controlling*) serta mengkoordinir dan melaporkan tugas pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Bersama Ketua, Panitera dan Sekretaris menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pola Bindalmin secara tepat dan benar;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Umum yang meliputi tata persuratan, kearsipan, perpustakaan, Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Pelaporan dan IT serta Urusan Umum dan Keuangan;

⁵² Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengatur dan Mengkoordinir kegiatan Hakim Pengawas Bidang yang meliputi bidang manajemen Peradilan, Administrasi Peradilan, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum;
- e. Memberi masukan, sumbangan saran kepada Ketua dalam hal penataan dan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Membuat jadwal rapat bulanan, triwulan, semesteran dan rapat tahunan yang dilaksanakan secara lengkap atau bagian-bagian tertentu sesuai keperluan;
- g. Selaku Ketua Majelis memimpin persidangan perkara dan bertanggung jawab atas penyelesaian perkara;
- h. Melakukan koordinasi dengan Ketua apabila ada pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku, perbuatan Pejabat/ Staf Pengadilan Agama Bengkalis yang bertentangan dengan Kode Etik/ PPH atau melanggar disiplin PNS;
- i. Melakukan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.⁵³

3. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Bengkalis secara baik dan lancar.

⁵³ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Hakim pada Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Menerima berkas perkara dari pimpinan atau Ketua Majelis;
 - b. Menetapkan hari sidang dan menyidangkan perkara sebagai Ketua Majelis;
 - c. Mendampingi Ketua Majelis dalam melaksanakan sidang;
 - d. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
 - e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis dalam pengambilan putusan/penetapan;
 - f. Menggali dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - g. Menjaga kerahasiaan Berita Acara Sidang;
 - h. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan;
 - i. Menanda tangani putusan yang sudah dicapkan;
 - j. Meminutasi berkas perkara;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan.⁵⁴
4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi

⁵⁴ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jabatan Paniterapada Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
- b. Menggerakkan dan mengarahkan setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan;
- c. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan dan mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan kepaniteraan;
- d. Mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan;
- e. Menyusun konsep kebijakan pimpinan dibidang kepaniteraan;
- f. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan;
- g. Mengadakan konsultasi dengan pimpinan setiap saat diperlukan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama;
- i. Menerima dan mengirimkan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali (PK);
- j. Menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Membantu Majelis Hakim dalam Persidangan, membuat BAS dan menandatangani;
- l. Menjaga kerahasiaan Berita Acara Persidangan;
- m. Membuat dan menandatangani salinan putusan/pentapan, Akta cerai, Akta Perdamaian dan akta-akta yang lainnya;
- n. Menandatangani Surat Kuasa;
- o. Melaksanakan penyitaan, eksekusi dan pelelangan yang diperintahkan Ketua;
- p. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, Akta, Biaya Perkara, uang titipan Pihak Ketiga, Surat-surat bukti dan surat lainnya yang di simpan di Kepaniteraan;
- q. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan;
- r. Memberikan SKP kepada bawahannya;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.⁵⁵

5. Wakil Panitera

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis bertugas membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum.

⁵⁵ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
- b. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat BAP dan mengetik putusan;
- c. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain membuat laporan periodik dan statistik, ketertiban dalam mengisi buku Register perkara dan lain-lain;
- d. Melaksanakan Tugas Panitera apabila panitera berhalangan;
- e. Menyampaikan berkas perkara kepada Ketua melalui panitera;
- f. Mengkoordinir dan mengawasi kelompok pelaksana tugas pada Meja I, kas, dan Meja III;
- g. Mengkoordinir tugas konsultan pembuatan Surat gugatan/ Permohonan dan Surat Kuasa;
- h. Mengurus administrasi bantuan Panggilan Penggugat/Tergugat, saksi/Keluarga dari Pengadilan Agama lain;
- i. Menkoordinir urusan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- j. Mengkonsep dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Muda Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum;
- l. Melakukan pengawasan terhadap bawahan, masuk dan pulang kantor serta membuat DP.3 pada akhir tahun;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.⁵⁶

6. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bengkalis bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai:

- a. Membantu tugas-tugas wakil panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan gugatan;
- b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama;

⁵⁶ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan;
- d. Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- e. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan gugatan;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- j. Membukukan dalam buku register tentang Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama;
- k. Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/Bendahara Penerima;
- l. Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran;
- m. Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama;
- n. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait;
- o. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya;
- q. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun;
- r. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;
- s. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- u. Melaksanakan administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.⁵⁷

7. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bengkalis bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

⁵⁷ Ibid.,

Jabatan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bengkalis,

berfungsi sebagai berikut:

- a. Membantu wakil panitera dalam penyelenggaran administrasi kepaniteraan permohonan;
- b. Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan;
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan;
- d. Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- e. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan permohonan;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- j. Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Membuat SKUM perkara permohonan untuk membayar panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/bendahara penerima;
- l. Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran;
- m. Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada wakil panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama;
- n. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait;
- o. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;
- p. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya;
- q. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya;
- r. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;
- s. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- u. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama.⁵⁸

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkalis bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik

⁵⁸ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Bengkalis. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Membantu wakil panitera dalam penyelenggarakan administrasi kepaniteraan hakim;
- b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- c. Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum;
- d. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- e. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan syahadah Rukyatulhilal berdasarkan petunjuk atasan;
- l. Memberikan pelayanan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan;
- m. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait;
- n. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;
- o. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya;
- p. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun;
- q. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;
- r. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- t. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- u. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.⁵⁹

9. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bengkalis bertugas membantu Hakim dalam hal mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminitasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Majelis Hakim dalam persidangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses persidangan sesuai dengan hukum acara;
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut;
- c. Mengisi rekapitulasi perkara setiap persidangan;
- d. Meneliti dan menandatangani Putusan dan atau Penetapan bersama Majelis Hakim;
- e. Membantu Hakim dalam hal:

⁵⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membuat Penetapan Hari Sidang;
 - Membuat Penetapan Sita Jaminan;
 - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
 - Mengetik keputusan;
- f. Melaporkan kepada Panitera Muda untuk dicatat dalam register perkara:
 - Menundaan hari-hari sidang;
 - Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya
 - g. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum dengan buku ekspedisi;
 - h. Melayani Majelis Hakim dalam proses kelengkapan berkas perkara yang masih berjalan;
 - i. Membantu tugas Hakim dalam menangani sisa perkara yang akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Muda Hukum pada setiap akhir bulan;
 - j. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;
 - k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.⁶⁰

⁶⁰ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Juru Sita

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita:

- a. Sebagai koordinator dari para Juru Sita Pengganti;
- b. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti;
- c. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara;
- d. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain: Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan;
- e. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali;
- f. Menjalankan Penetapan Sita dan Putusan Hakim (Eksekusi);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib dan Pelelangan Putusan atas sengketa;
- h. Mengkordinir, mendistribusikan dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah Pengadilan Agama Demak;
- i. Mencatat register permohonan, Penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak serta Eksekusi;
- j. Membantu mengetik permohonan gugatan, P3HP dan keterangan waris;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya⁶¹.

11. Juru Sita Pengganti

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkalis bertugas membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Jabatan Juru Sita Pengganti, berfungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua majelis sidang;

⁶¹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan pemanggilan, pemberitahuan putusan Pengadilan Agama, putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Menyampaikan akta permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding;
- d. Menyampaikan akta pernyataan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi;
- e. Melakukan pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali dan pemberitahuan jawaban atas permohonan peninjauan kembali;
- f. Melakukan pemberitahuan pemeriksaan berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- g. Menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan/ penetapan pengadilan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- h. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama dan membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;
- i. Melaksanakan eksekusi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan membuat berita acara eksekusi, yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melakukan penawaran pembayaran uang dengan membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebut jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan;
- k. Menyiapkan formulir instrumen PGL, PBT dan JST untuk keperluan dalam penerimaan biaya panggilan/biaya pemberitahuan dan kasir yang telah ditandatangani oleh majelis hakim/petugas meja III;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;
- m. Secara kelembagaan juru sita/juru sita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, sedangkan secara administratif juru sita/juru sita pengganti bertanggung jawab kepada panitera.⁶²

12. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, berfungsi sebagai berikut:

- a. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi umum;
- b. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;

⁶² Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan;
- d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- e. Membagi tugas pada kasubag;
- f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kesekretariatan;
- g. Memantau pelaksanaan tugas bawaha;
- h. Mengadakan rapat dinas;
- i. Sebagai sekretaris, mengatur tugas kepala subbagian;
- j. Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya, dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola setingkat lebih tinggi sebagai bahan penyusunan RKK AKL;
- k. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan;
- l. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun;
- m. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas terpadu antara Tim Pengelola, Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dalam hal mencairkan dana kepaniteraan pada KPPN setempat;
- o. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan kesekretariatan;
- p. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan kesekretariatan pada setiap akhir tahun;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.⁶³

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pelaksanaan fungsi organisasi dan tata laksana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- f. Kepegawaian, lebih rinci berfungsi antara lain:
 - Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;

⁶³ *Id.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan agar kualitas SDM yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan;
- Memantau hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- Menyiapkan baha pertimbangan karir pegawai;
- Memproses usulan pengangkatan pegawai;
- Memproses usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai;
- Memproses usulan pemberhentian pegawai;
- Memproses usulan pension pegawai;
- Memproses usulan mutasi;
- Memproses pemberian penghargaan bagi pegawai yang telah memnuhi syarat yang ditetapkan;
- Mempersiapkan bahan rancangan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai;
- Menyusun usulan formasi pegawai;
- Mendokumentasikan data-data pegawai;
- Menyusun data statistic kepegawaian;
- Memproses surat izin cuti pegawai;
- Memproses pengumpulan dan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memproses urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan Tapsen, Karis/Karsu, Bapertarum, serta BPJS;
 - Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan Lakip;
 - Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Organisasi, lebih rinci berfungsi antara lain:
- Menyiapkan bahan penataan organisasi;
 - Menyiapkan bahan penyusunan uraian jabatan;
 - Menyiapkan bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan);
 - Menyiapkan bahan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan peta jabatan atau persyaratan jabatan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka analisis beban kerja;
 - Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tata laksana, lebih rinci berfungsi antara lain:
- Menyiapkan bahan penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI));
 - Menyiapkan bahan monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI));
 - Menyiapkan bahan evaluasi dan pengembangan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI));
 - Menyusun rancangan pedoman tata persuratan;
 - Menyiapkan bahan untuk pengembangan kinerja organisasi;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - Melakukan legal drafting atas konsep peraturan;
 - Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

14. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data atau informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan system dan teknologi informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan satker;

⁶⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika;
- e. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja satker;
- f. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja satker;
- g. Penyiapan rumusan kebijakan teknologi informasi;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, teknologi informasi, dan perencanaan;
- i. Perencanaan, lebih rinci berfungsi sebagai berikut:
 - Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja);
 - Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);
 - Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT);
 - Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan;
 - Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ATB);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memantau pelaksanaan DIPA;
 - Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Teknologi informasi, lebih rinci berfungsi sebagai berikut:
- Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam *website*;
 - Melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware*, meliputi server, computer dan perangkat pendukungnya;
 - Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
 - Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
 - Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pelaporan, lebih rinci berfungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006;
- Membuat Laporan Kinerja Semesteran;
- Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kapaniteraan;
- Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP;
- Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

15. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan rumah tangga,

⁶⁵ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlengkapan, perpustakaan, humas, protocol dan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data/informasi sebagai bahan rumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan satker;
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protocol;
- e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan keuangan;
- f) Umum, lebih rinci berfungsi sebagai berikut:
 - Melakukan urusan administrasi surat masuk;
 - Melakukan urusan administrasi surat keluar;
 - Melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi;
 - Melakukan urusan penggandaan;
 - Melakukan urusan perpustakaan;
 - Melaksanakan urusan Tata Usaha Pimpinan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran;
 - Melaksanakan urusan Tata Usaha surat/dokumen yang akan ditandatangani Pimpinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
- Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Melaksanakan perawatan kendaraan dan inventaris Setker dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Setker;
- Melaksanakan perpanjangan STNK dalam rangka mewujudkan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- Melaksanakan administrasi pengadaan Setker;
- Melaksanakan administrasi peminjaman peralatan dan mesin Setker (Pinjam Pakai);
- Melaksanakan penyelesaian draft Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Setker dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Setker luar;
- Melaksanakan pelayanan keprotokolan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan;
- Melaksanakan pelayanan urusan dalam guna menunjang kelancaran penyelesaian pekerjaan dan kenyamanan bekerja;
- Melaksanakan pengelolaan ruang rapat dan sarana pendukungnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan pengadaan konsumsi rapat dan jamuan pimpinan;
- Melaksanakan pengadaan Kerumahtanggaan guna menunjang kelancaran penyelesaian pekerjaan dan kenyamanan bekerja;
- Melaksanakan penatausahaan barang persediaan;
- Melaksanakan penatausahaan barang milik Negara;
- Melaksanakan pemberian identifikasi barang inventris;
- Melaksanakan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan;
- Melaksanakan pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan;
- Membuat Daftar Inventaris Ruangan;
- Melakukan persiapan penghapusan barang inventaris kantor;
- Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan inventaris kantor;
- Melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Negara;
- Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris dan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Keuangan, lebih rinci berfungsi sebagai berikut:
- Melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Melakukan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - Melakukan proses pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan Pengawasan terhadap Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
 - Melakukan Pemeriksaan Kas dan Menyiapkan Register Penutupan Kas;
 - Melaksanakan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS);
 - Melaksanakan pembayaran atas beban penggantian uang persediaan (SPP-GU);
 - Menyusun laporan surat pertanggungjawaban realisasi;
 - Melaksanakan perekaman data transaksi keuangan;
 - Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan KKPN;
 - Menyusun Laporan Realisasi Belanja Bulanan;
 - Menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan;
 - Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Menyusun Laporan Realisasi PNBK;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan;
- Menyusun Laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

3. Daftar Nama Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis.

Berikut ini adalah nama-nama pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis:⁶⁷

Tabel 3:
Nama-Nama Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2018

a. Ketua Pengadilan

Nama	Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
NIP	19740926 199903 2 001
Tempat, Tanggal. Lahir	Palembang, 26 September 1974
Pangkat/Golongan	Pembina (IV/a)
Jabatan	Ketua

b. Wakil Ketua

Nama	Rika Hidayati, S.Ag., M.H.
NIP	19790809 200112 2 002
Tempat, Tanggal. Lahir	Pariaman, 9 Agustus 1979

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkat/Golongan	Pembina Tk. I (IV/a)
Jabatan	Wakil Ketua

c. Hakim

Nama	Muhammad Kadafi Basori, S. H.I
NIP	19801210 200805 1 001
Tempat, Tanggal. Lahir	Kalaten, 10 Desember 1980
Pangkat/Golongan	Penata (III/c)
Jabatan	Hakim

Nama	Darman Harun, S.H.I
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	-
Pangkat/Golongan	Penata (III/c)
Jabatan	Hakim

d. Panitera

Nama	Drs. Zulkifli, S.H., M.H
NIP	19680222 199803 1 002
Tempat, Tanggal. Lahir	Solok, 22 Februari 1968
Pangkat/Golongan	Pembina (IV/a)
Jabatan	Panitera

e. Wakil Panitera

Nama	Drs. H. Syafaruddin, M.H
NIP	19620101 199203 1 005
Tempat, Tanggal. Lahir	Bengkalis, 01 Januari 1962
Pangkat/Golongan	Pembina (IV/a)
Jabatan	Wakil Panitera

f. Sekretaris

Nama	Darsono, S.Pd.I., M.H
NIP	19820509 200312 1 002
Tempat, Tanggal. Lahir	Titi Akar, 09 Mei 1982
Pangkat/Golongan	Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Panita Muda Hukum

Nama	Zamzam Lubis, S.H., M.H
NIP	19810408 200805 1 001
Tempat, Tanggal. Lahir	Tanjung Botung, 8 April 1981
Pangkat/Golongan	Penata (III/c)
Jabatan	Paniter Muda Hukum

h. Panitera Muda Gugatan

Nama	Helmi Candra, S.Ag., M.H
NIP	19740515 200112 1 003
Tempat, Tanggal. Lahir	Pulau Rambai, 15 Mei 1974
Pangkat/Golongan	Pembina (IV/a)
Jabatan	Paniter Muda Gugatan

i. Panitera Muda Permohonan

Nama	Zetty Aqmy, S.Ag
NIP	19720722 200312 2 001
Tempat, Tanggal. Lahir	Bengkalis, 22 Juli 1972
Pangkat/Golongan	Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	Paniter Muda Permohonan

j. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bengkalis

Nama	Yusuf, S.Ag., M.H
NIP	19710502 200604 1007
Tempat, Tanggal. Lahir	Tanjung Belit, 2 Mei 1971
Pangkat/Golongan	Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bengkalis

k. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Bengkalis

Nama	Zuhrini, S.Si., S.E.Sy
NIP	19820321 200604 2 005
Tempat, Tanggal. Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1982

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkat/Golongan	Penata Muda (III/a)
Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Bengkalis

l. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Bengkalis

Nama	Wira Ahdina, S.E
NIP	19790625 200912 2 004
Tempat, Tanggal. Lahir	Bukit Tinggi, 25 Juni 1979
Pangkat/Golongan	Penata (III/c)
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Bengkalis

m. Panitera Pengganti

Nama	Sudarmono, SH.I., M.H
NIP	19810410 200912 1 003
Tempat, Tanggal. Lahir	Grobogan, 10 April 1981
Pangkat/Golongan	Penata (III/c)
Jabatan	Panitera Pengganti

n. Jurusita dan Jurusita Pengganti

Nama	Hardi Susanto, Amd., S.E.Sy
NIP	19810314 200904 1 003
Tempat, Tanggal. Lahir	Duri, 14 Maret 1981
Pangkat/Golongan	Penata Muda (III/a)
Jabatan	Jurusita

Nama	Idham Khalid, S.E.Sy
NIP	19830917 200604 1 005
Tempat, Tanggal. Lahir	Bantan Tua, 17 September 1983
Pangkat/Golongan	Penata (III/a)
Jabatan	Jurusita Pengganti

Nama	Zuhrini, S.Si, S.E.Sy
NIP	19820321 200604 2 005
Tempat, Tanggal. Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1982

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkat/Golongan	Penata (III/a)
Jabatan	Jurusita Pengganti

o. Profil Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama	Mufti Arifudin, S.Sy
NIP	19890428 201712 1 001
Tempat, Tanggal. Lahir	Bogor 28 April 1989
Pangkat/Golongan	Penata (III/a)
Jabatan	CAKIM

Nama	Rhezza Pahlawi, S.Sy
NIP	19890514 201712 1 004
Tempat, Tanggal. Lahir	Bogor, 14 Mei 1989
Pangkat/Golongan	Penata (III/a)
Jabatan	CAKIM

p. Staf

Nama	Yushadeni, S.HI., L.L.M
NIP	19870914 201212 2 001
Tempat, Tanggal. Lahir	Inhu, 14 September 1987
Pangkat/Golongan	Penata (III/c)
Jabatan	Staf

q. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Nama	Rismawati
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Tanjung Alai, 1 Maret 1985
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Fitriana, S.E.Sy
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Pekanbaru, 19 April 1988
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Siti Fatmawati, S.E.Sy
NIP	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat, Tanggal. Lahir	Ponorogo, 30 Agustus 1983
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Junainah
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Teluk Pambang, 30 Mei 1978
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Yuyun Julaiha, S.E.Sy
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Astanajapura, 24 April 1987
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Kamarizzaman, S.E.Sy
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Bantan Air, 23 Maret 1985
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Slamat Firdaus, S.Akun
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Widasari, 23 Agustus 1985
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Nazori, S.HI
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Bengkalis, 9 April 1975
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Saududdin Ikhsan
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Penampi, 27 April 1985
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Saripuddin, S.E.Sy
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Sungai Tohor, 24 Oktober 19983
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	Syahrani, S.E.Sy
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Sungai Tohor, 29 Mei 1986
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Pramubakti

Nama	M. Zubair, S.E.Sy
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Panipahan, 9 Maret 1983
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Sopir

Nama	Bahari
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Penebal, 2 Januari 1976
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Jasa Satuan Pengaman

Nama	Daud
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Titik Akar, 17 Juli 1984
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Jasa Satuan Pengaman

Nama	Surya Iskandar
NIP	-
Tempat, Tanggal. Lahir	Selat Baru, 15 Januari 1983
Pangkat/Golongan	-
Jabatan	Jasa Satuan Pengaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon yaitu: (a) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan; (b) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan dan; (c) Ada *kemaslahatan* (kebaikan) jangka panjang yang harus diselamatkan meskipun harus melanggar *kemafsadatan* (kerusakan) jangka pendek. Hal ini sudah sejalan dengan kaidah fiqih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat."

2. Pengaruh dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon yaitu: (a) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikabulkan permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan, maka secara aturan hukum para calon pengantin baik laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi syarat dari usia pernikahan bisa melangsungkan nikah secara resmi yang dicatat langsung oleh Pegawai Pencaatta Nikah dalam hal ini adalah Kanor Urusan Agama (KUA); (b) dengan dikabulkannya semua permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan, maka secara tidak langsung bisa menjadi penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah dimasa mendatang yang akan diajukan oleh mereka yang memiliki masalah yang sama; (c) dengan dikabulkannya semua permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrash*) tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan sebagai rujukan oleh pengadilan lain atau hakim yang lain dalam memutus sebuah perkara dalam kasus yang sama (yurisprudensi) dan; (4) dengan dikabulkannya semua permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrash*), maka putusan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan penelitian terkhusus di dunia akademisi dan hasilnya bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi dunia peradilan untuk lebih baik kedepanya.

3. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur diajukan oleh para Pemohon ditinjau menurut *maqâshid syarîah* yaitu sebagai berikut: (a) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan); (b) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, maka hal ini tidak sejalan dan bertentangan dengan *maqashid syariah hifdzul nasl* (menjaga keturunan); (c) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan); (d) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, maka hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan) namun ada *maqashid syariah* lain yang dilanggar yaitu *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan); (e) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, setelah mereka menikah lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punya anak dan kedua orang tua pertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nafs* (menjaga jiwa); (f) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, setelah mereka menikah lalu punya anak dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nafs* (menjaga jiwa) namun ada *maqashid syariah* lain yang dilanggar yaitu *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan) dan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan); (g) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, setelah mereka menikah lalu punya anak dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul alq* (menjaga akal); (h) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, setelah mereka menikah lalu punya anak dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul alq* (menjaga akal) namun ada *maqashid syariah* lain yang dilanggar yaitu *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashid syariah yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan). Intinya ingin menyelamatkan *maqashid syariah* yang lain, namun sudah terlanjur melanggar *maqashid syariah* yang lain pula dan yang melanggar *maqashid* tersebut adalah anak pemohon atau termohon yang akan melangsungkan pernikahan bukan majelis hakim Pengadilan yang menyelesaikan perkara.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan data-data yang telah penulisan analisis dalam disertasi ini, ada saran-saran dan rekomendasi yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2018 dikarenakan calon pengantin perempuan sudah hamil duluan, hal ini bisa terjadi dikarenakan disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah minimnya pemahaman agama, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, minimnya pengawasan orang tua dan media yang berdampak negatif. Oleh karena itu orang tua sangat perlu sekali memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, pemerintah perlu memberikan pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi, pengawasan orang tua kepada anak-anak perlu diperketat dan pertegas, membatasi pergaulan dan jam bermain anak-anak serta selalau memperhatikan dan mengecek alat-alat komunikasi yang diberikan kepada mereka seperti andorid;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada pemerintah yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah, hendaknya memfasilitasi bagi anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi diberi semacam keterampilan secara gratis dan cuma-cuma seperti menjait, bertenun, las, bengkel dan lain-lain. Selain menyibukkan mereka dengan kegiatan dan perbuatan yang bermanfaat disisi lain dengan skil yang dipunya mereka mampu untuk memperoleh penghasilan sendiri. Karena salah satu faktor penyebab terjadinya nikah muda itu adalah para pelaku tidak ada kesibukan dan kegiatan sehingga kerjanya jalan kesana kemari tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kemudian ada waktu dan kesempatan maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan dan akhirnya menikah di usia muda. Kemudian kepada terkhusus tokoh agama, tokoh adat, ninik mamak, orang yang dituakan serta tokoh masyarakat, agar selalu berperan aktif untuk mengingatkan, memberi nasehat dan menegur kepada anak-anak muda yang mereka mungkin bergaul muda-mudi berlebihan seperti bertamu di kos-kosan samapi larut malam, berboncengan berduaan kesana-kemari yang bukan muhrim dan perbuatan lain yang bisa mendekatkan kepada hal-hal yang berbau negatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Ayut Putri, *Gambaran Perilaku Seksual Siswa Salah Satu SMA Negeri di Kota Padang*, (Padang: Universitas Andalas, 2016).
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Malik Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah, tt).
- Abdullah Ahmad An-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, (London: Zed Books, 2002).
- Asyurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet 1.
- Abd 'Isa Muhammad bin 'Isa Saurah al-Tirmidzi, *Sunan Turmudzi*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003).
- Abd Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, (Bayrut: Alam al-Kutub, t.t.), Jilid Ke-8.
- Abd Dawud Sulaiman bin Asyats as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut Dar al-fikri, tt).
- Abd Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abul Ishaq Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).
- Abul Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), Juz IX, Cet. III.
- Abul Razak al-Sanhuri, *Masadir al-Hak fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt).
- Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt).
- Adams dan Washkito, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta, Wahyu Media, 2008).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995).
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010).
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi: 1969).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi'ilm al-Ushul*, (Beirut al-Kutub al-Ilmiyah, 1983).
- , *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz I.
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012).
- Al-Fasi, *Maqashid as Syariah al Islamiah*, (Beirut: Dar al Ghorbi al Islami, 1992).
- Alidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. I.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Hafidh ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shanai fi Tartib asy-Syarai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz III, Cet. 2.
- Al-As'ad, Terjemahan Fat-Hul Mu'in, (Surabaya: Menara Kudus, t.t).
- Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, t.th).
- Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), Jilid III.
- Al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H), Jilid III.
- Al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1944).
- Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1993), Jilid VI.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- , *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama, Cetakan Ke-4.
- Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Andi Syamsu Alam dan Moh.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996).
- Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, (Jakarta: AIPJ2, 2019).
- B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 4.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Bappenas, 2020).
- D. Agustin, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada Pekerja Shift di PT Krakatua Tirta Industri Cilegon*, (Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, (London: CIMEL and Kluwer Law International, 1996).
- Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Toha Putra, 2007).
- , *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), Cet. II.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, (Bandung: Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009).
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta, Erlangga: 1980).
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), Cet. 5.
- Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar, Eka Radiyani Oktavia Widyawati, Widya Hary Cahyati, *Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun*, (Semarang: Higeia Journal Of Public Health Research And Development, Higeia 2 (2) (2018).
- Fauziyatu Sufiyyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*, (Jurnal Living Hadits, Volume 3, Nomor 1, 2018).
- Feldman Robert S, *Understanding Psychology*, (New York: McGraw Hill, 1996).
- H Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Kalam Mulia, 1994).
- Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Al Mizan, Volume 09, Nomor 01, Tahun 2013).
- Hanka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz XVII.
- Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, (Gorontalo: Pengadilan Negeri Tilamuta, 2016).
- Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).
- Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).
- Ibnu Qudomah, *Al-Mughni*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt), Jilid IV.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut : Dar al- Fikr, t.t), Juz 2.
- Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naysabuny, *Shahih Muslim*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Jilid II.
- Imam At Tabrani, *Al-Mu'jam Al kabir*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt).
- Imam Bukhori, *Shahi Bukhari*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2003).
- Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut-Libanon: Darul Kitab, t.t.).
- Imam Jalaludin Al Mahalli dan Jalaludi As Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemah Bahrn Abu Bakar, (Bangdung: Sinar Baru Algensindo, 2007).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi. Aksara, 2004).
- Izz al-Din Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, (Kairo: al-Istiqamat, t.t), Volume 1.
- J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003, Edisi V.
- Jamilah, Reni Kartika Wati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Pemuda, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014).
- Joannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Kartono, Kartini dan Jenny Andari, *Hygiene, Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1989).
- Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), Cet. I.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012).
- Levy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. Ke-16.
- LIPI PBN, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, (Jurnal Ahkam, Volume XVI, Nomor 1, Tahun 2016).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. Ke-7.
- , *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010).
- , *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996).
- , *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2001).
- M. Syuhud, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- M. Nuaba, dkk, *Pengantar Kuliah Obstetri*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2012).
- M. Rdani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha ilmu 2011).
- M. tahul Jannah, dkk, *Rentang Kehidupan Manusia (Life Span Development) Dalam Islam*, (Jurnal, Volume 3, Nomor 1, tahun 2017).
- M. h Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 21.
- Mubasyarah, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Bandung: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016).
- Mehlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Muhammad Abu Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa Imam al-Shatibi*, (Tunis: Maktabah al- Kawakib, t.t).
- Muhammad Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mushtasyfa min Ilm al-Usul*, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah, 1356 H), Jilid I.
- Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Duna Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. I.
- Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, (Surabaya: alMiftah, 1992).
- Muhammad Asyaf, *al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, (Bairut Dar Ihya al-Ulum, 1985).
- Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori, *Sohih al-Bukhori*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt).
- Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idis al- Marbawiy: Arab-Melayu*, (Bandung: al-Ma'arif, tt).
- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Penterjemah), (Jakarta: Lentera, 2004).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa. Maskur A.B. Dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), Cet. Ke-7.
- Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Surakarta: Jurnal Universitas Muhamadiyah, 2015).
- Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir* (Marah Labid), (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), Jilid ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.).
- Naim al-Din al- ufi, *Shar al-Arbain al-Nawawiyah: Mulhiq al-Maslahah fi al-Tashrii' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954).
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermains,1991).
- Nong Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991).
- Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994).
- Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), Cet. V.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Rahmat Arijaya, *Hukum Perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia)* (Tesis: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).
- Rini Hildayani, *Modul I Perkembangan Manusia*, (Banten: Jurusan PAUD, Universitas Terbuka, 2014).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo, Muassasah al-Halabi, 1976), Juz IV.
- Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya: al-Ikhlas,1992), Cet 2.
- Saidul Millah, *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Misykart, Volume 02, Nomor 02, Tahun 2017).
- Samin Syukur dan Luluk Rodliyah, *Rohmatul Ummah*, (Surbaya: Al-Ikhlas, 1993), Cet. Ke-1.
- Sawono, S.W, 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Saifia Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi 1, Cet. Ke-3.
- Sa'ayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002).
- Sujoko, Stevanus, dan Yuliawati, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*, (Jakarta: Ghalia, 2007).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, (Yogyakarta : ANDI, 2004).
- Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1996).
- Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), Cet. I.
- Syhab al-Din al-Qarafi, *Shar Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Ma sul fi al-Usul*, (Mesir: al-Matba'ah al- Khairiyyah, 1307).
- Syhabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1994), Juz IV, Cet. 1.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim Marriage*, (New Delhi: t.p., 1972).
- Taqiuddin Abu Bakar al-Husni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2.
- Tjeng Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Lentera, 2001).
- Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014).
- Umar Bakri, *Tafsir Madrasy*, (Ponorogo: Percetakan Darussalam Gontor, 2000), Juz I.
- UNICEF dan PUSKAPA UI, *Factsheet: Child Marriage in Indonesia*, (Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI, 2020).
- W Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- , *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, Cet. 2.
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita, 1990).
- Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2011).
- Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, (Dalam Jrnal Hukum Islam Fasih Uin Suska, Volume XIV, Nomor 1, 2014).
- Yusuf Al-Qardawi, *Fiqi Maqasyid Maqasyid*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Zanul Anwar, Maulida Rahmah, *Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja*, (Yogyakarta:Jurnal Intervensi Psikologi, Volume 7, Nomor 2, 2015).

INTERNET

<https://www.pa-bengkalis.go.id/>.

Mifti, "Hukum Keluarga Islam di Pakistan", dalam <http://www.scribd.com/>, Artikel diakses pada tanggal 11 Nopember 2019.

JURNAL DAN JURNAL

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As Hermanto, *Peran Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam*, (Jurnal Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 11, Nomor 01, Tahun 2018).
- Chamim Tohari, *Pembaharuan Maqasyid Syariah Dalam Pemikiran Muhammad Thahir bin Atsur*, (Jurnal Al Maslahah, Volume 13, Nomor 01, Tahun 2017), Hal. 471-472, Lihat juga Abdul Malik Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H).
- Devi Hantono, dkk, *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, (Jurnal Nature, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018).
- Eggy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, (Bandung: Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009).
- Eti Nur Indah, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, (Jurnal Al Ta'dib, Volume 6, Nomor 1, tahun 2013).
- Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Ulama Tentang Illat Hukum (Suatu Kajian ushul Fiqh)*, (Jurnal Darussalam, Volume 15, Nomor 02, Tahun 2014).
- Ganang Iqbal Sudantoko, *Tinjauan Tentang Bentuk dan Pelaksanaan Asuransi Pada Pegawai Basarnas Di Wilayah Kota Surakarta*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muahamadiyah Surakarta, 2018).
- Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Al Mizan, Volume 09, Nomor 01, Tahun 2013).
- Jamilah, Reni Kartika Wati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Pemuda, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014).
- Mistahul Jannah, dkk, *Rentang Kehidupan Manusia (Life Span Development) Dalam Islam*, (Jurnal, Volume 3, Nomor 1, tahun 2017).
- Mubasyarah, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Bandung: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016).
- Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Surakarta: Jurnal Universitas Muhamadiyah, 2015).
- Saiful Millah, *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Misykart, Volume 02, Nomor 02, Tahun 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (volume 17 Nomor 6, 2011).

Ta Panjiasih Susmiarsih, dkk, *Peningkatan Pengetahuan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seks dalam Upaya Cegah Seks Pranikah pada Siswa-Siswi SMPN 77 dan SMAN 77 Jakarta Pusat*, (Universitas Gajah Mada Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, tahun 2019).

Zahul Anwar, Maulida Rahmah, *Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja*, (Yogyakarta:Jurnal Intervensi Psikologi, Volume 7, Nomor 2, 2015).

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0060/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA. Bkls, Diambil Pada Tanggal 10 Januari 2020.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Arman, *Ringkasan Disertasi Maqasyid Syariah Tentang Nikah Dalam Kitab Hikmah Al- Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (W. 1380 H/1961 M)*, (Pekanbaru, Pascasarjana Uin Suska Riau, 2018).

D. Agustin, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada Pekerja Shift di PT Krakatua Tirta Industri Cilegon*, (Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012).

Rahmat Arijaya, *Hukum Perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia)* (Tesis: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

Skripsi Ikhdha Nur Shofa, *Faktor Usia Terhadap Komplikasi Pada Kehamilan Akibat Kegagalan Kontrasepsi* (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Tambakrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro Jawa Timur), (Jombang: Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, 2017).

UNDANG-UNDANG

Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 638. K/Sip/1969 dan Nomor 673.K/Sip/1972 tentang Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*).

Ketab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*).

Ketab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2001).
- Ratifikasi Undang-Undang atau Peraturan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Tentang Usia Minimum Untuk di Perbolehkan Bekerja.
- Putusan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 tahun 1977 Perihal Pelaksanaan jalan pengadilan Pemeriksaan kasasi dalam Perkara Perdata dan Pidana oleh Peradilan Agama dan Peradilan Umum.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Lentera, 2001).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1) dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

SULTAN SYARIF KASIM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Khoiri

ID Number : 1403061707898469

Date of Birth : July 17, 1989

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 48

Structure & Written Expressions : 54

Reading Comprehension : 54

Overall Score : 520

Expire Date : May 22, 2021



Mahyudin Syukri, M.A.

NIP. 19720421-200604-1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Jalan Lembaga, No.01 - Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Telp/ Fax (0766) 21441

Homepage: www.pa-bengkalis.go.id/ Email: admin@pa-bengkalis.go.id

BENGKALIS (28751)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : W4-A5/1251/KP.04.6/12/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I.
NIP : 19790809 200112 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bengkalis
Alamat : Jalan Pembangunan II

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khoiri
Tempat Tgl.Lahir : Tanjung Katung
NIM : 31890515498
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah)
Jenjang : Doktoral (S.3)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau

Adalah benar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasyim Riau telah melakukan penelitian dan mengambil Data dalam rangka Penulisan Skripsinya yang berjudul "**Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut *Maqashid Syariah* (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 30 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis

Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I.

NIP. 19790809 200112 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 September 2019

2281/Un.04/PPs/PP.00.9/2019
: 1 berkas
: Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Disertasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terdapat Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Dengan hormat,
Dalam rangka penulisan disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk
mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

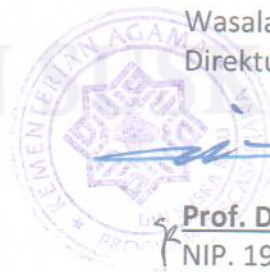
Nama	: Khoiri
NIM	: 31890515498
Program Pendidikan	: Doktor (S3)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: III (Tiga)
Judul Disertasi	: Dispensasi Nikah Telaah Maqasyid Syariah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari Pengadilan Agama Bengkalis.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001



© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751

Telepon 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail : Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 12 Maret 2020

Kepada :

Yth. Kepala Pengadilan Agama Bengkalis
di -

Tempat

061/DPMPTSP-JU/III/2020/244

Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/31828 tanggal 09 Maret 2020 perihal PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : KHOIRI
Alamat : JALAN LAKSAMANA, GANG AMD, KEL. DAMON, KEC. BENGKALIS, KAB. BENGKALIS
NIM : 31890515498
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASYIM RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
Jenjang : S3

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

- Judul :
"DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT MAQASYID SYARIAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS)".
- Lokasi Penelitian :
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS.
- Penelitian ini berlangsung selama 6 Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 12 Maret 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMP/SP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru;
4. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dr. Khoiri, S.Sy., M.H
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Katung, 17 Juli 1989
 Pekerjaan : Dosen/Advokat
 Alamat Rumah : Jalan Laksamana, Gang Amd,
 Kelurahan Damon, Kecamatan
 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
 No. Telp/HP : 082387888817
 Nama Orang Tua : Darmuji (Ayah)
 Napsiah (Ibu)

Nama Mertua : Abdul Aziz (Ayah)
 Nurmianti (Ibu)
 Nama Istri : Maryani, Amd. Keb
 Nama Anak : Arsy Nafeeza Khaira

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 092 Tanjung Katung : Lulus Tahun 2003
2. MTSN Selatpanjang : Lulus Tahun 2006
3. MAN Selatpanjang : Lulus Tahun 2009
4. SI Uin Suska Riau : Lulus Tahun 2013
5. S2 UIR : Lulus Tahun 2015
6. S3 Uin Suska Riau : Lulus Tahun 2020

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. MDA Al-Khairiyah : Lulus Tahun 2003
2. MDW Bahrul Ulum : Lulus Tahun 2006
3. MDU Bahrul Ulum : Lulus Tahun 2009
4. Pendidikan Khusus Provesi Advokat : Lulus Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Dosen Luar Biasa Uin Suska Riau (2015)
- b. Dosen STAIN Bengkalis (2016-Sekarang)
- c. Dosen Tamu Politeknik Negeri Bengkalis (2018)
- d. Advokat dan Konsultan Hukum (2019-Sekarang)
- e. Dosen Tamu STAI Nurul Hidayah Selatpanjang (2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Badan Legislatif Mahasiswa Fasih Uin Suska Riau (2013- 2015)
2. Pengurus Himpunan Takmir Masjid (HITMA) Kota Pekanbaru (2009-2015)
3. Pengurus Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kabupaten Bengkalis (2018-2023)
4. Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bengkalis (2019-2024)
5. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis (2019-2024).

KARYA ILMIAH

1. Buku Filsafat Islam (Sebuah Pengantar)
2. Buku Etika Profesi Hukum (Sebuah Pengantar Bagi Penegak Hukum)
3. Buku Perbankan Syariah di Indonesia (Sebuah Pengantar)
4. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
5. Buku Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus Ditinjau Menurut Perspektif Islam
6. Jurnal Antara Adat dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau Ditinjau dari Perspektif Islam) (Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2017)
7. Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang (Jurnal Cendikia Hukum, 2018)
8. Jurnal Mengukur Kerentanan Perbankan Syariah di Tengah Dinamika Krisis Perekonomian Global (Studi Bank Muamalah Indonesia) (Jurnal Akademika, 2017)
9. Jurnal Gugatan Harta Bersama (Telaah Sema Nomor 3 Tahun 2018) (Jurnal Ahwal Al Syakhsiyyah, 2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Opini Pemilih Cerdas (Riau Pos 2016)
11. Opini Adakah yang Tahun: Guru dan Kemuliaan (Metro Riau, 2015)
12. Opini Mencari Pemimpin Idaman Rakyat (Metro Riau, 2015)
13. Opini Asik, Perperes Berobat Gratis Dicabut (Metro Riau, 2015)
14. Opini Malaikat Tanpa Tanda Jasa (Metro Riau, 2015)
15. Opini Wah, Ada Pekan Kondom Nasional (Metro Riau, 2015)
16. Opini Selamat Jalan Bapak Revolusioner (Metro Riau, 2015)
17. Opini Menuju Penerimaan CPNS Bersih (Metro Riau, 2015)
18. Opini Dana Kampanye Kemanakah Menguap (Metro Riau, 2015) dan lain-lain.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU